

WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



EDISI KHUSUS HUT TNI KE-74

" PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER YANG DIARAHKAN PADA PEMBANGUNAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI MENUJU TERWUJUDNYA POSTUR IDEAL TNI "

" PERAN SUMBER DAYA PERTAHANAN DALAM Mendukung SISTEM PERTAHANAN NEGARA "

" MEMBANGUN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN UTAMA MENGHADAPI ERA PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA KONDISI KEKINIAN "

" PERAN STRATEGIS UNIVERSITAS PERTAHANAN DALAM MENCETAK SDM PERTAHANAN DENGAN SEMANGAT BELA NEGARA "

" MEWUJUDKAN INDUSTRI PERTAHANAN YANG KUAT, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM Mendukung PEMBANGUNAN KEKUATAN POKOK MINIMUM (MEF) TNI "

" KIPRAH TNI SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PERTAHANAN NEGARA DI KANCAH DUNIA INTERNASIONAL "



EKSISTENSI TNI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DAN NIR-MILITER MULTIDIMENSIONAL DI ERA MILENIAL

ISSN 1693-0231



INDONESIA



Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi Khusus HUT TNI ke 74 tahun 2019.

Selain itu dalam edisi ini tim redaksi juga mengetengahkan beberapa artikel, diantaranya : Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir Militer Multidimensional di Era Milenial; Pembangunan Postur Pertahanan Militer Yang Diarahkan Pada Pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)* TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI; Peran Sumber Daya Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara; Membangun Kapabilitas Sumber Daya Manusia Komponen Utama Menghadapi Era Perkembangan dan Dinamika Kondisi Kekinian; Peran Strategis Universitas Pertahanan dalam Mencetak SDM Pertahanan Dengan Semangat Bela Negara; Mewujudkan Industri Pertahanan Yang Kuat, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*MEF*) TNI serta Kiprah TNI Sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara di Kancah Dunia Internasional.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi



EDISI KHUSUS 2019

Diterbitkan oleh:
Biro Humas Setjen Kemhan
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard
Ryacudu

Sekjen Kemhan
Laksdya TNI Agus Setiadji, S.AP, M.A

Pemimpin Umum:

Karo Humas Setjen Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

Pemimpin Redaksi:

Kabag Infopubliktika Biro Humas
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Biro Humas

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, M.M.

Daftar Isi

ARTIKEL



5/

EKSISTENSI TNI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DAN NIR MILITER MULTIDIMENSIONAL DI ERA MILENIAL



Posisi strategis Indonesia telah dimanfaatkan oleh negara lain dalam berbagai macam bentuknya, Indonesia dijadikan konsumen dalam perdagangan bagi produk-produk negara lain, sehingga Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar. Dalam konteks geostrategis, hal tersebut tentunya menjadi suatu bentuk ancaman yang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

12/

PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER YANG DIARAHKAN PADA PEMBANGUNAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF)* TNI MENUJU TERWUJUDNYA POSTUR IDEAL TNI

19/

PERAN SUMBER DAYA PERTAHANAN DALAM Mendukung SISTEM PERTAHANAN NEGARA

26/

MEMBANGUN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN UTAMA MENGHADAPI ERA PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA KONDISI KEKINIAN

33/

PERAN STRATEGIS UNIVERSITAS PERTAHANAN DALAM MENCETAK SDM PERTAHANAN DENGAN SEMANGAT BELA NEGARA

39/

MEWUJUDKAN INDUSTRI PERTAHANAN YANG KUAT, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM Mendukung PEMBANGUNAN KEKUATAN POKOK MINIMUM (*MEF*) TNI

45/

KIPRAH TNI SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PERTAHANAN NEGARA DI KANCAH DUNIA INTERNASIONAL

EKSISTENSI TNI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DAN NIR MILITER MULTIDIMENSIONAL DI ERA MILENIAL

Oleh:

Prof. Dr. Armaidly Armawi, M.Si.

Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Darto Wahidin, S.Pd.

Peneliti Pada Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Dunia saat ini telah berada dalam sebuah penyatuan, proses penyatuan tersebut dilakukan secara serentak yang dikenal dengan nama globalisasi. Merujuk pada pengertian globalisasi yang dapat diartikan sebagai suatu proses yang menghasilkan dunia tunggal, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung satu dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan budaya (Sztompka, 1994; Hallak, 1998; Martono, 2014). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sesungguhnya globalisasi sebagai sebuah proses yang akan menjadikan dunia dalam satu area yang dapat dikendalikan melalui satu kekuatan global. Berhubungan dengan hal ini, negara-negara yang mempunyai kekuatan besar yang akan mengendalikan proses tersebut. Ohmae (1990) dengan tegas menyebutkannya sebagai *the borderless world* atau yang dikenal sebagai dunia tanpa batas. Dalam hal ini ruang lingkup globalisasi ini tidak mengenal batas-batas sebuah negara, bahkan antara negara satu dengan yang lainnya sudah tidak ada batasannya lagi.

Dalam perkembangannya ternyata globalisasi telah membawa empat kekuatan besar, seperti: *investment* (investasi modal), *industry* (perkembangan industri),

information technology (teknologi informasi), dan *individual consumers* (konsumen individu) (Ohmae, 1990). Keempat kekuatan besar tersebut telah mewarnai negara-negara yang ada di dunia. Salah satunya di Indonesia, sebagai negara yang masih berkembang dengan cakupan wilayah yang luas dari Sabang hingga Marauke, jumlah penduduk yang menempati urutan keempat di dunia, setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dalam konteks geopolitik posisi negara dan wilayah yang sangat strategis tersebut ternyata Indonesia dimanfaatkan oleh negara-negara yang sudah maju dalam berbagai macam bentuk yang dinamakan dengan globalisasi.

Posisi strategis Indonesia telah dimanfaatkan oleh negara lain dalam berbagai macam bentuknya, Indonesia dijadikan konsumen dalam perdagangan bagi produk-produk negara lain, sehingga Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar. Dalam konteks geostrategis, hal tersebut tentunya menjadi suatu bentuk ancaman yang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini diperlukan pemahaman terhadap lingkungan strategis dengan berbagai macam fenomena yang terjadi, seperti: fenomena alam, fenomena dunia, globalisasi,

kemajuan teknologi, geoekonomi dan geopolitik negara-negara, keamanan dalam negeri, dan kejahatan lintas negara (Marsetio, 2014: 121-125). Dinamika lingkungan strategis dunia saat ini berkembang sangat dinamis dan harus dapat diantisipasi oleh Indonesia. Apalagi jika dikaitkan dengan politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Artinya, dalam hal tersebut Indonesia tidak boleh memihak salah satu blok maupun salah satu negara, di sini Indonesia harus memainkan peran menjadi negara penengah. Kontribusi Indonesia dalam pecaturan dunia sangat di butuhkan oleh negara-negara lainnya. Namun disisi lain, Indonesia juga menghadapi persoalan yang tidak kalah peliknya di dalam negerinya sendiri.

Dalam perjalanan sejarah, sesungguhnya Indonesia mampu mengatasi berbagai macam ancaman yang melanda dan menyimpannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, kesiapsiagaan tetap harus di nomor satukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari uraian di atas, maka dapat di tarik sebuah pertanyaan, bagaimana eksistensi TNI di era milenial saat ini?; apa saja ancaman militer dan nir militer yang bersifat multidimensional?; dan bagaimana penguatannya dalam konteks ketahanan nasional? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan

permasalahan yang dapat dijawab dan dijelaskan, mengingat hal tersebut sangat penting dalam mengkaji eksistensi TNI terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam era milenial ini.

Eksistensi TNI di Era Milenial

Sebelum membahas secara detail terkait Tentara Nasional Indonesia (TNI), alangkah baiknya untuk mengkaji sekilas terkait dengan konsep eksistensi. Eksistensi secara etimologi berasal dari aliran filsafat eksistensialisme, dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Gerakan eksistensialisme sendiri sangat menentang esensialisme. Istilah eksistensi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagus (2005: 185), yang menjadi pusat perhatian dalam hal situasi manusia. Dalam konteks yang sama terkait dengan istilah

eksistensi disampaikan pula oleh Kirkegaard bahwa eksistensi sebagai suatu keputusan yang berani diambil oleh manusia untuk menentukan hidupnya dan menerima konsekuensi yang telah manusia ambil (Martin, 2001). Manakala manusia tersebut berani untuk bereksistensi maka manusia tersebut telah bereksistensi dengan sebenarnya. Begitupun sebaliknya, jikalau manusia tidak berani untuk bereksistensi maka dapat dipastikan manusia itu tidak bereksistensi dengan sebenarnya.

Dengan runtuhnya rezim orde baru dan digantikan oleh reformasi, ternyata semangat reformasi pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan (*future*) dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini ternyata membawa suatu transformasi terhadap sistem

kenegaraan di Indonesia, tidak terkecuali juga menimpa militer. Proses transformasi yang terjadi dapat dilihat dari pergantian nama yang semula Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hakikat dari transformasi Tentara Nasional Indonesia dalam reformasi terkait dengan transformasi dari *dwifungsi* untuk menuju militer yang *professional* (Widjojo, 2015: xvii). Bahkan dalam konteks politik praktis peran militer di Indonesia telah diminimalkan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pada konteks pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkedudukan di bawah Presiden. Selanjutnya, dalam hal kebijakan maupun strategi pertahanan dan dukungan administrasi, Tentara Nasional Indonesia berada di



Sumber: Biro Humas Kemhan



Sumber: Biro Humas Kemhan

bawah koordinasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Huda, 2015: 254). Wujud nyata amanah dalam konstitusi tersebut menempatkan posisi Tentara Nasional Indonesia senantiasa berkiprah untuk mencegah terjadinya ancaman militer dan nir militer serta memberikan andil dalam memajukan bangsa dan negara. Pada masa damai Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan atensinya sebagai kekuatan dalam membantu pemerintahan melalui berbagai macam tugas khusus atau yang dikenal dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia pada era milenial ini sangat berat karena dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi spektrum ancaman menjadi tidak mudah lagi untuk

dideteksi, sehingga konsep perangpun sudah mengalami transformasi yang begitu kompleks. Artinya, sekarang perang bukan hanya berhubungan dengan kekuatan fisik atau berhadapan secara langsung (*face to face*) sebagaimana yang terjadi dalam perang dunia I dan II. Perang saat ini telah mengalami suatu bentuk pergeseran (*shifting*) paradigma. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mulai bermunculan istilah berbagai macam perang, yakni: perang asimetris, perang ideologi, perang pola pikir (*mindset*), perang informasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemua hal tersebut dapat dikatakan menjadi suatu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Tentara Nasional Indonesia juga harus dapat mengubah paradigmanya dalam melihat persoalan dinamika

lingkungan strategi global yang sangat cepat berubah, sehingga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.

Ancaman Militer dan Nir Militer Bersifat Multidimensional

Dinamika lingkungan strategi global yang begitu cepat, telah menggeser suatu paradigma bahwa ancaman itu saat ini telah bersifat multidimensional. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008) bahwa ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nir militer atau yang lebih dikenal juga dengan ancaman non militer. Kedua ancaman tersebut sesungguhnya sangat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup dalam kehidupan bangsa dan negara. Ancaman militer



merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai punya kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut serta udara, dan konflik komunal. Dalam pada itu, ancaman nir militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nir militer ini dapat berdimensi dalam bentuk ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, teknologi dan informasi.

Untuk ancaman militer yang sering terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur, lebih tepat di Papua masih banyak terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, misalnya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terjadinya peristiwa yang menimpa mahasiswa di Kota Surabaya, Malang, dan Semarang telah mengakibatkan terjadinya konflik yang mengakibatkan timbulnya keinginan dari beberapa oknum masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa tersebut memicu terjadinya demo besar-besaran di beberapa kota yang ada di Papua. Hal ini menjadi suatu bentuk keprihatinan bagi rakyat Indonesia karena ada oknum-oknum yang mengobarkan api amarah di Papua.

Dalam pada itu, dua isu saat ini yang menjadi ancaman nir militer atau non militer yang sedang melanda Indonesia, mewabahnya paham radikalisme di Indonesia. Radikalisme sebagai suatu tindakan dan gerakan, ditandai oleh aksi ekstrem yang dilakukan untuk mengubah

suatu keadaan seperti yang diinginkan (Jainuri, 2016: 5). Tujuan dari Gerakan radikal tersebut pada dasarnya untuk dapat mendirikan suatu sistem yang diinginkan dan dicita-citakan oleh kelompoknya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2019) setidaknya ada enam perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme. Bukan berarti perguruan tinggi lainnya tidak terpapar oleh paham radikalisme hanya saja presentasinya masih kecil.

Ancaman nir militer lainnya adanya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Padahal, sebenarnya Pancasila ini sudah bersifat final dan tidak boleh ada yang menentangnya lagi. Namun, keberadaan Pancasila sendiri saat ini telah terusik. Survei yang disampaikan oleh Lembaga Survei Indonesia (2018), menunjukkan bahwa dalam waktu 13 tahun, sejak tahun 2005 publik yang pro Pancasila mencapai 85,2%, tahun 2010 menjadi 81,7%, tahun 2015 angkanya menjadi 79,4%, dan tahun 2018 menjadi 75,3%. Terjadi sebuah penurunan dalam kurun waktu 13 tahun menjadi 10%. Pada sisi

lain, publik yang pro NKRI bersyariah dalam kurun waktu 13 tahun, bahwa sejak tahun 2005 angka masih mencapai 4,6%, tahun 2010 menjadi 7,3%, tahun 2015 kemudian mencapai 9,8%, dan tahun 2018 telah mencapai 13,2%. Hal ini menunjukkan bahwa publik yang pro NKRI bersyariah mengalami kenaikan sebesar 9%. Ternyata Pancasila pada tataran praktisnya sangat ditentang oleh beberapa oknum dan elemen bangsa, yang masih menginginkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara syariah.

Data survei tersebut menunjukkan bahwa ancaman nir militer ini begitu nyata adanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Padahal ideologi Pancasila yang dianut oleh Bangsa Indonesia dapat menyatukan masyarakat yang sangat heterogen. Dulu para *founding fathers* telah menyepakatinya dengan mencoret sila pertama pada Piagam Jakarta tersebut dan hal tersebut disetujui oleh berbagai elemen bangsa.

Dengan demikian, kondisi ancaman tersebut harus segera ada perbaikan dan penyelesaian. Artinya, tidak hanya Tentara Nasional Indonesia yang memperbaikinya dan menyelesaikannya, namun semua elemen dan komponen Bangsa Indonesia bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. Karena ancaman yang terjadi tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ancaman militer dan nir militer sebagai akibat dari globalisasi yang melanda dunia, akan berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan itu, konsepsi tentang geostrategi Indonesia sangat diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat yang sangat majemuk dan heterogen dengan mengacu pada Pembukaan UUD 1945, geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional (Armawi, 2018: 62). Oleh karena itu, maka di sini penguatan ketahanan nasional sangat dibutuhkan, bahkan penting untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan Ketahanan Nasional

Dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional, maka penguatan terhadap ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terelakkan (*conditio sine qua non*). Penguatan (*reinforcement*) merupakan bentuk



Sumber: [Biro Humas Kemhan](#)

dari sebuah respon, baik itu yang bersifat verbal maupun nonverbal (Usman, 2006: 80). Merujuk dalam dunia militer, tentunya respon tersebut merupakan suatu bentuk dari adanya ancaman yang terjadi baik berasal dari dalam maupun luar yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu penguatan yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi atau umpan balik (*feedback*) bagi Bangsa Indonesia untuk mendorong suatu tindakan maupun koreksi. Dalam menghadapi ancaman penguatan yang dilakukan di sini harus lebih ditekankan pada ketahanan nasional.

Menurut Armawi (2018: 62), bahwa ketahanan nasional berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan (kuat), yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Sebagai sebuah strategi landasan konseptual agar menjadikan mata pisau analisis guna memecahkan berbagai macam masalah (*problem*) Bangsa Indonesia, setidaknya dalam ketahanan nasional (*national resilience*) sendiri di analisis dengan menggunakan delapan pendekatan astagatra atau aspek dari kehidupan nasional, meliputi 3 aspek alamiah atau (*trigatra*), sifat *trigatra* sendiri bersifat statis, sedangkan aspek lima lainnya dalam kehidupan (*pancagatra*) yang selalu bersifat dinamis.

Setiap negara di dunia ini, dalam menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasionalnya dari negara itu sendiri, yang sangat diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Pengkajian ketahanan nasional sangat penting (*urgent*) bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional (Armawi, 2018: 63). Dalam konteks tersebut, sesungguhnya setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut.

Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti: tegaknya hukum

Sumber: Biro Humas Kemhan

dan ketertiban (*law and order*), terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*defence and security*), terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*) (Wahyono, 1996).

Kesimpulan

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang di bawa oleh globalisasi ternyata menimbulkan ancaman bagi suatu negara, tak terkecuali ancaman tersebut juga dapat melanda Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan kekuatan militer yang dimiliki oleh Republik Indonesia harus mampu menghadapi dinamika lingkungan strategi global dan regional dari adanya paradigma transformasi perang yang terjadi saat ini melalui perang asimetris, perang ideologi, perang pola pikir, maupun perang informasi. Perang yang ada tersebut ternyata tidak menggunakan biaya yang mahal ataupun pasukan yang banyak, cukup dengan menggunakan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara dan manusia yang mampu mengendalikannya. Bahkan perang tersebut ternyata dengan mencuci otak manusia-manusia dalam suatu negara, kelak dikemudian hari akan menentang secara ekstrim terkait dengan ideologi yang dianut oleh negara.

Pada hakikatnya dapat dilihat dari ancaman militer dan nir militer. Persoalan ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut serta udara, dan konflik komunal. Sebaliknya,

ancaman nir militer berdimensi dalam bentuk ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, teknologi dan informasi. Ancaman ini sifatnya multidimensional, maka tentunya menjadi suatu kewaspadaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Penguatan terhadap ketahanan nasional sangat dibutuhkan, ketahanan nasional Indonesia harus berparadigma pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ***

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, Armaidly. 2018. Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bagus, Lorens. 2005. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiman, F. Budi. 2007. Filsafat Modern dari Machiavelli Sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia.
- Hallak, J. 1998. *Education and Globalization*. Paris: UNESCO.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jainuri, Achmad. 2016. Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi. Malang: Intrans Publishing.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2019. Perguruan Tinggi Terpapar Terorisme.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Lembaga Survei Indonesia. 2018.

Pro-NKRI Menurun 10%, Pro-NKRI Bersyariah Naik 9%.

- Marsetio. 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Martin, Vincent. 2001. Filsafat Eksistensialisme: Kierkegaard, Sartre, Camus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono, Nanang. 2014. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ohmae, K. 1990. *The Borderless World: Power and Strategy in Interlinked World Economy*. New York: Harbet Business.
- Sztompka, P. 1994. *The Sociology of Social Change*. UK: Blacwell Publishers.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Usman, M., U., 2006. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widjojo, Agus. 2015. Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pengulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Wiyono, Hadi dan Isworo. 2007. Kewarganegaraan. Jakarta: Interplus.

PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER YANG DIARAHKAN PADA PEMBANGUNAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI MENUJU TERWUJUDNYA POSTUR IDEAL TNI

Oleh:

Mayjen TNI Rizerius Eko Hadisancoko, S.E., S.AP., M.Si
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan



Sumber: Biro Humas Kemhan

Pendahuluan

D Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 2). Sistem pertahanan yang bersifat semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui upaya membangun postur pertahanan negara yang tangguh dan memiliki daya tangkal yang tinggi

guna menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, baik berupa ancaman nyata maupun ancaman belum nyata.

Dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama di bantu oleh unsur kekuatan bangsa lainnya (Ibid, Pasal 7) dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.

Sesuai dengan Visi, Misi dan program prioritas pemerintah dalam tatanan Pembangunan Nasional, pembangunan postur pertahanan negara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang sinergi dengan pembangunan bidang lainnya dengan mengintegrasikan pembangunan postur pertahanan militer dan pembangunan postur pertahanan nirmiliter. Perwujudan pembangunan postur pertahanan negara ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan sesuai skema penganggaran yang realistis guna menjamin kesinambungan rencana pembangunan pertahanan jangka panjang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Pembangunan postur pertahanan negara juga akan tercapai, jika

didukung sumber daya nasional berupa sumber daya manusia, sumber daya alam/buatan, wilayah dan sarana prasarana yang memadai untuk mewujudkan keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan penggelaran pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sehingga nantinya akan memiliki kemampuan pertahanan negara yang handal dan disesuaikan dengan doktrin dan strategi pertahanan negara, serta diselaraskan dengan adanya sumber daya yang terbatas dan kemungkinan adanya ancaman yang dihadapi.

Sebagai bagian dari pembangunan postur pertahanan negara, pembangunan pertahanan militer juga senantiasa berubah secara dinamis, sesuai dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis dengan berbagai prediksi ancaman yang muncul. Dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut menuntut agar Indonesia berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan kawasan regional termasuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, serta peluang melakukan kerjasama keamanan internasional. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepan, diantaranya adalah bagaimana postur pertahanan militer mampu menghadapi konstelasi keamanan regional dan internasional terkait dengan berbagai dinamika perubahan *balance of power*; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pembangunan postur pertahanan militer dilakukan secara bertahap, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang secara berkesinambungan. Pentahapan pembangunan postur pertahanan militer ini diharapkan akan dapat mewujudkan postur pertahanan yang mampu mengatasi

ancaman di 3 (tiga) wilayah *trouble spots* secara bersamaan dengan tetap menyisakan 1 (satu) kekuatan cadangan. Kekuatan ini merupakan cerminan dari adanya pembagian 3 (tiga) wilayah pertahanan yang meliputi wilayah Indonesia barat, tengah dan timur dan sekaligus untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan yang muncul (Kemhan (2015). *Minimum Essential Force TNI 2015*. Jakarta: Kemhan, hlm. 2).

Pembangunan postur pertahanan militer telah ditetapkan sebagai satu kebijakan di bidang pertahanan yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkannya. Upaya mencapai terwujudnya postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dalam hal penganggaran dan industri pertahanan nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. Dengan adanya berbagai keterbatasan terhadap pembangunan postur pertahanan militer tersebut, maka hingga saat ini implementasi pembangunannya diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)*. Dalam menjaga kesinambungan pembangunan tentunya perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pertahanan secara konsisten.

Pentahapan Pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)* TNI

Pembangunan *MEF* disusun berdasarkan pada: Pertama, skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*); Kedua, kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*); Ketiga, berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan Keempat, dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya

URAIAN	SBLM MEF	MEF I	MEF II 2015-2019	MEF III 2020-2024	POSTUR IDEAL
KOGABWILHAN			1	2	3
KOOPSSUS			1	1	1
STT TNI			1	4	5

Sumber: Srenum TNI, Mei 2019

dengan negara sahabat/*Confidence Building Measure* (CBM) (Kemhan (2014). *Penyelarasan Minimum Essential Force* Tahun 2014. Jakarta: Kemhan, hlm. 6).

Pembangunan MEF TNI dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu Tahap I (tahun 2010-2014) yang telah berakhir, Tahap II (tahun 2015-2019) yang saat ini sedang berjalan, dan Tahap III (tahun 2020-2024) yang merupakan tahap akhir pembangunan MEF TNI. Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi : revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Empat strategi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan aspek-aspek utama seperti: alat utama sistem senjata (Alutsista), pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana, yang didukung dengan aspek-aspek pendukung yang meliputi: industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Strategi ini juga akan mempertimbangkan kebijakan pengembangan personel TNI yang tidak lagi menggunakan prinsip kebijakan *zero growth* dan *right sizing*, namun

URAIAN	SBLM MEF	MEF I	MEF II 2015-2019	MEF III 2020-2024	POSTUR IDEAL
KOSTRAD	2 DIV	2 DIV	3 DIV	3 DIV	4 DIV
KOPASSUS	3 GRP	3 GRP	3 GRP	3 GRP	3 GRP
KODAM	12	13	15	15	15
BALAKPUS	23	24	25	27	27
SENJATA RINGAN	92.155	613.043	634.919	723.564	783.462
MERIAM/ROKET/RUDAL	962	1.144	1.457	1.354	2.162
RANPUR/TANK	1.321	1.641	2.045	3.738	4.858
SABANG/PESAWAT	67	104	121	224	1.224
PANGKALAN	4.575	4.736	4.888	4.979	5.005
PERSONEL	313.324	322.980	329.238	354.026	379.389

Sumber: Srenad, Mei 2019

dengan kebijakan *proporsional growth* sejalan dengan pengembangan organisasi TNI saat ini. Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) *trouble-spots* secara bersamaan, serta 1 (satu) kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan (Kemhan (2015). *Minimum Essential Force* TNI 2015. Jakarta : Kemhan, Hal.2).

URAIAN	SBLM MEF	MEF I	MEF II 2015-2019	MEF III 2020-2024	POSTUR IDEAL
KOARMADA	2	2	3	3	3
PASMAR	2	2	3	3	3
SATLINLAMIL	2	2	2	3	3
WING UDARA	2	2	3	3	3
KRI + KS	144 + 2	146 + 2	157 + 4	182 + 8	262 + 12
PESUD	62	72	91	100	160
RANPUR	413	440	503	978	1.481
LANTAMAL	11	11	14	14	14
LANAL	46	49	32	34	72
LANUDAL	9	9	11	13	18
LANMAR	2	2	3	3	3
PERSONEL	64.711	75.779	87.061	109.669	143.695

Sumber: Srenal, Mei 2019

Pembangunan MEF TNI sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pertahanan negara bukan merupakan sebuah kondisi yang statis, namun senantiasa berubah secara dinamik, sesuai dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis, hakikat dan bentuk ancaman. Perubahan itu juga disebabkan oleh dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya serta kemampuan pembiayaan negara. Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses kaji ulang pada tataran strategis yang dilakukan secara periodik, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

URAIAN	SBLM MEF	MEF I	MEF II 2015-2019	MEF III 2020-2024	POSTUR IDEAL
KOHANUDNAS	1	1	1	1	1
KOOPSAU	2	2	3	3	3
PESAWAT	211	261	267	344	469
RADAR HANUD	17	20	20	32	32
LANUD	42	42	42	46	48
SKADRON UDARA	18	19	19	23	26
RUDAL JARAK SEDANG	0	0	0	72	96
PSU	20	24	24	64	216
AIM/AAM	49	49	51	587	2016
AGM	27	68	68	362	1032
PASKHAS	7	9	9	13	13
PERSONEL	32.154	39.992	42.030	44.229	44.229

Sumber: Srenau, Mei 2019

Pengembangan dan Pencapaian Pembangunan MEF TNI Saat ini

- Pengembangan kekuatan TNI yang telah dan sedang dilaksanakan meliputi:
 - Pembangunan Kekuatan Kewilayahan TNI AD dari 12 Kodam menjadi 15 Kodam.
 - Peningkatan 3 (tiga) Pangkalan TNI AL (Lanal) menjadi Lantamal.
 - Peningkatan 4 (empat) Pangkalan TNI AU Type B menjadi Type A:
 - Pembentukan Divisi Infanteri 3 Kostrad di Makasar, Armada III di Sorong, Pasmar 3 di Sorong, dan Koopsau III di Biak.
 - Pembentukan Koopssus TNI.
 - Rencana pembentukan 3 (tiga) Kogabwilhan TNI meliputi Kogabwilhan I wilayah Barat, Kogabwilhan II wilayah Tengah dan Kogabwilhan III wilayah Timur.
 - Rencana pembentukan Koarmada RI yang membawahi 3 (tiga) Koarmada Wilayah (Koarmada I, II dan III).



Sumber: Foto Dispenal

8) Rencana pembentukan Koopsudnas yang membawahi 3 (tiga) Koopsau (Koopsau I, II dan III).

mencapai 81,58% bila dibandingkan dengan *Baseline* mencapai 45,62%.

b. Realisasi Capaian Pembangunan *MEF* TNI Tahap II Tahun 2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

2) Capaian di Bidang Program Kegiatan Pemenuhan Alutsista

1) Capaian di Bidang Anggaran

Anggaran pembangunan *MEF* TNI tahap II Tahun 2015-2019, diproyeksikan sebesar 2,2% sampai dengan 2,6% dari PDB. Untuk mendukung aspek utama *MEF* TNI meliputi Alutsista, Harwat, Organisasi dan Sarana prasarana (Sarpras). Alokasi anggaran *Base Line MEF* TNI Tahap II pada Renstra Tahun 2015-2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Capaian *MEF* TNI yang didukung Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari 44 kegiatan baru mencapai 16 kegiatan terkontrak, dengan pencapaian kegiatan sebesar 15%.
- b) Capaian *MEF* TNI yang didukung Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dari 65 kegiatan baru mencapai 55 kegiatan terkontrak, dengan pencapaian kegiatan sebesar 90%.
- c) Capaian *MEF* TNI yang didukung Rupiah Murni (RM) dari 33 kegiatan, pencapaian sudah 100% terkontrak semua.

3) Capaian di Bidang Fisik

Secara kuantitas, realisasi hasil pembangunan Alutsista pada Tahap II sampai Tahun 2019, apabila dibandingkan dengan target keseluruhan yang diproyeksikan dalam pembangunan *MEF*, dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

- a) Secara keseluruhan Realisasi anggaran *MEF* tiga aspek utama meliputi Alutsista, Harwat dan Sarpras Tahun 2015-2019 dihadapkan dengan Renbut mencapai 32,75%, bila dihadapkan dengan *Baseline* anggaran mencapai 47,29%, bila alokasi anggaran *MEF* dihadapkan dengan DIPA rata-rata tiap tahunnya pembangunan *MEF* terdukung 32,28%.

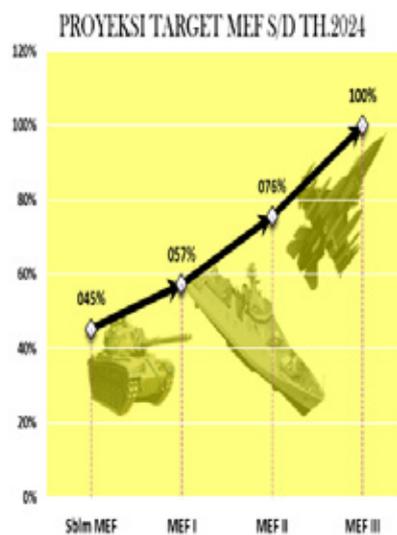
- a) Pemenuhan Alutsista TNI AD telah mencapai 76,03% dari total target keseluruhan dari pembangunan *MEF* TNI AD.
- b) Pemenuhan Alutsista TNI AL telah mencapai 69,13% dari total target keseluruhan dari pembangunan *MEF* TNI AL.
- c) Pemenuhan Alutsista TNI AU telah mencapai 45,19% dari total target keseluruhan dari pembangunan *MEF* TNI AU.

- b) Realisasi anggaran *MEF* aspek Alutsista Tahun 2015-2019 dihadapkan dengan Renbut mencapai 29,39%, bila dihadapkan dengan *Baseline* anggaran mencapai 43,80%.

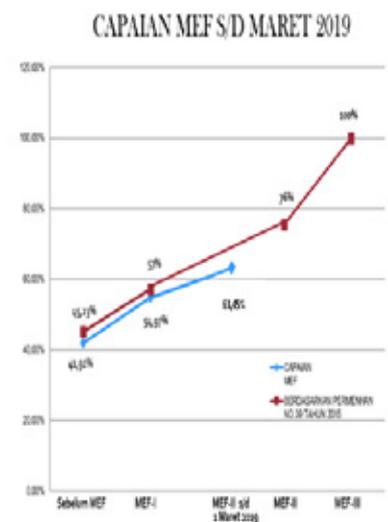
Dengan demikian rata-rata pemenuhan Alutsista pada pembangunan *MEF* TNI Tahap II sampai Tahun 2019 telah mencapai 63,45% dari total target pembangunan *MEF* secara keseluruhan.

- c) Realisasi anggaran *MEF* aspek Harwat Tahun 2015-2019 dihadapkan dengan Renbut mencapai 37,41%, bila dihadapkan dengan *Baseline* mencapai 67,82%.

- d) Realisasi anggaran *MEF* aspek Sarpras Tahun 2015-2019 dihadapkan dengan Renbut



Sumber : Permenpan 39/2015 Tentang MEF TNI



Sumber : Direktorat Jenderal Fasilitas MEF TNI, Maret 2019

Aspek Pendukung Pembangunan MEF TNI

Kebijakan pembangunan pada aspek pendukung terpisah dari penganggaran pembangunan MEF TNI. Namun secara spesifik pembangunan aspek pendukung tersebut harus dipenuhi untuk mampu mendorong terwujudnya pembangunan MEF secara menyeluruh. Aspek pendukung MEF TNI meliputi:

a. Industri Pertahanan.

Pemberdayaan industri pertahanan diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan Alutsista dan pengembangan industri pertahanan, telah ditetapkan penyeimbangan tahapan pembangunannya dalam rangka saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan MEF Tahap I yang menjadi tahapan awal pembangunan Alutsista, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang mencanangkan era Kebangkitan Industri Pertahanan dengan berorientasi pada penetapan program, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan, serta penyiapan *new future products*.
- 2) Pembangunan MEF Tahap II yang menjadi tahapan lanjutan pembangunan Alutsista mengarah pada postur, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang difokuskan untuk mendukung MEF, peningkatan kemampuan kerjasama produksi, dan *new product development*.
- 3) Pembangunan MEF Tahap III yang menjadi tahapan transisi

pembangunan Alutsista menuju postur ideal, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang difokuskan untuk mendukung postur ideal, *industry growth* (produk jangka menengah), dan peningkatan kerja sama internasional (*new product development-advance technology*).

- 4) Pembangunan postur ideal setelah MEF tercapai, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang mengarah pada kemandirian industri pertahanan yang signifikan, kemampuan berkolaborasi secara internasional, dan pengembangan yang *sustainable*.

b. Profesionalisme Prajurit

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara jelas menetapkan bahwa salah satu jati diri TNI adalah tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih,



Sumber : Foto Kemhan

terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kriteria profesionalisme yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh prajurit TNI adalah terlatih, terdidik, dan diperlengkapi dengan baik. Ketiga persyaratan tersebut perlu dicapai seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan *MEF*. Terlatih berarti mahir, terampil dan tangkas dalam menjalankan tugas yang diperoleh melalui berbagai latihan dan penugasan. Terdidik berarti ahli dan menguasai bidang pekerjaannya, yang diperoleh dari berbagai macam pendidikan, baik pendidikan pengembangan umum maupun pendidikan spesialisasi. Sedangkan diperlengkapi dengan baik mempersyaratkan bahwa untuk menunjang profesionalisme perlu didukung pemenuhan kebutuhan perlengkapan yang memadai, baik secara perorangan maupun satuan pada tingkatan yang terendah hingga yang tertinggi.

c. Kesejahteraan.

Kesejahteraan sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan *MEF* dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial prajurit TNI agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Kesejahteraan diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian *MEF*, yang meliputi peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan perumahan, serta layanan kesehatan dan pendidikan anak. Terjaminnya kesejahteraan prajurit TNI diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan *MEF* secara menyeluruh.

- 1) Peningkatan Penghasilan. Kesejahteraan prajurit TNI dianggap masih belum memenuhi standar yang memadai sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan negara.
- 2) Pemenuhan Perumahan. Jumlah perumahan bagi setiap prajurit TNI dan PNS telah disediakan oleh negara sangat terbatas, sehingga perlu adanya pengembangan fasilitas perumahan dalam rangka mendukung kebutuhan pelaksanaan tugas.
- 3) Layanan Kesehatan dan Pendidikan Anak. Layanan

kesehatan dan pendidikan anak merupakan salah satu faktor pendukung kesejahteraan prajurit TNI dan keluarganya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

- 4) Jaminan Hari Tua. Jaminan hari tua dikembangkan antara lain melalui pembenahan sistem pensiun dan layanan memasuki purna bakti.

Penutup

Kebijakan pembangunan postur pertahanan militer yang implementasinya diselenggarakan dalam kebijakan pembangunan *MEF* TNI secara mendasar untuk mewujudkan kepentingan mendesak pembangunan pertahanan negara dalam kerangka mewujudkan postur ideal TNI, yang dapat berubah dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman nyata yang dihadapi serta diperlukan komitmen, konsistensi, dan kontinuitas dari segenap komponen bangsa agar pelaksanaan pembangunannya dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.***

PERAN SUMBER DAYA PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Oleh:

Brigjen TNI Priyanto, S.I.P., M.Si. (Han)

Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan

Pendahuluan

Mempersiapkan kekuatan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah keniscayaan bagi suatu bangsa yang menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah *deterrent effect* yang ampuh bagi negara lain untuk menahan diri melakukan konfrontasi dengan Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan menerapkan suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk mencapai tujuan negara. Pertahanan yang bersifat semesta tersebut hakikatnya merupakan suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2014 : 25).

Kesemestaan dalam sistem pertahanan tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat dan

segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh (*holistic*) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pertahanan semesta merupakan pengintegrasian antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui sebuah usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta berdaya tangkal tinggi. Sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta tersebut dibangun secara berkelanjutan dan terus menerus guna menghadapi berbagai jenis ancaman baik berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Berbagai ancaman tersebut secara akumulatif dikelompokkan menjadi ancaman nyata dan ancaman belum nyata (Ibid : 29).

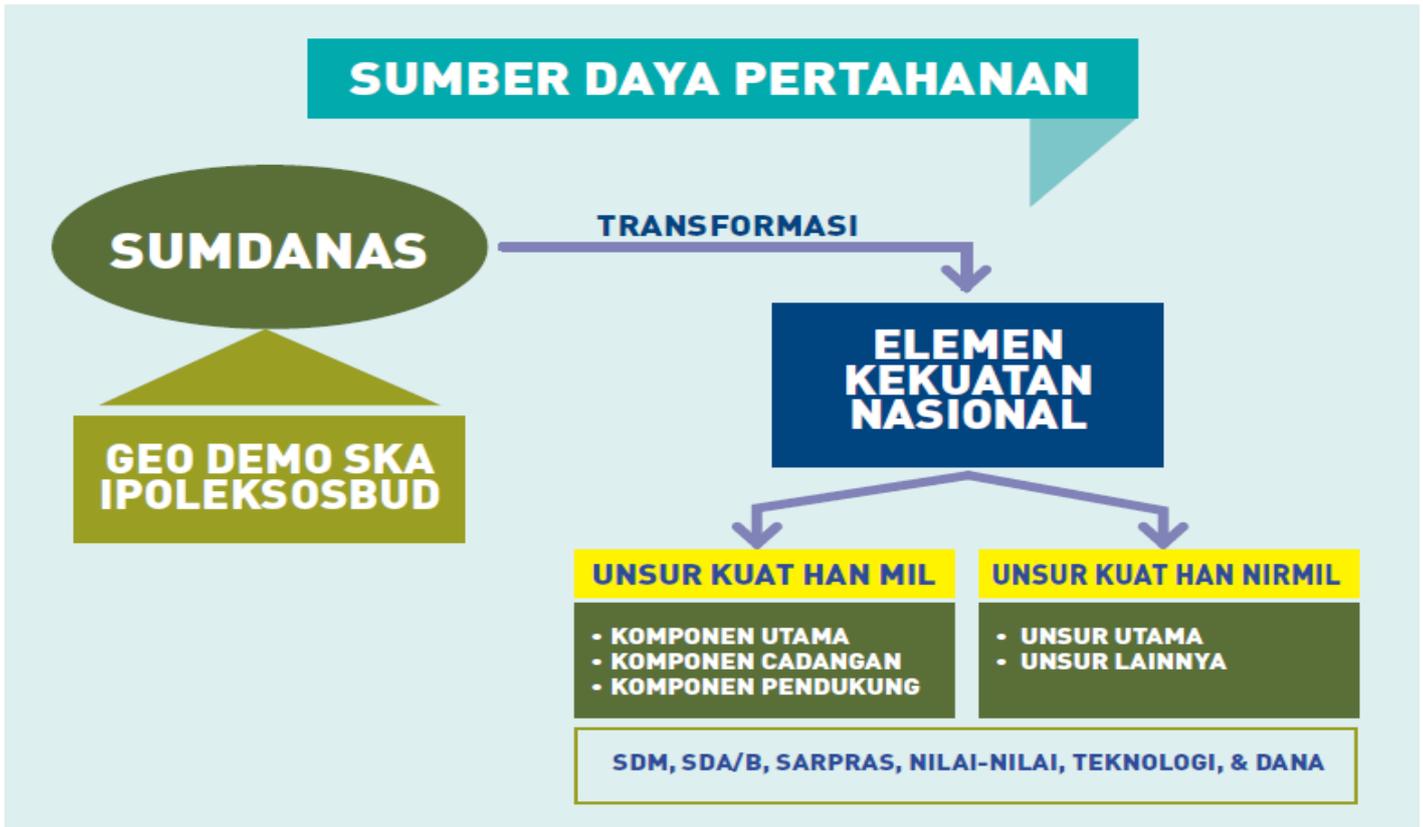
Dalam Buku Strategi Pertahanan Negara tahun 2015 dikemukakan bahwa sumber daya pertahanan dikelola melalui proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya nasional menjadi elemen kekuatan nasional. Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari: Sumber daya pertahanan militer dan sumber daya pertahanan nirmiliter (Strategi Pertahanan Negara, 2015 : 52).

Sumber Daya Pertahanan Militer terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan, Komponen Pendukung dan Sarana dan Prasarana Nasional. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter

disusun Sumber Daya Pertahanan Nirmiliter yang terdiri dari Unsur Utama yang merupakan sinergi dari kementerian/lembaga diluar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Unsur Sumber Daya Pertahanan Nirmiliter lainnya adalah Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang berperan mendukung efektifitas dan efisiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter.

TNI merupakan komponen utama yang diperkuat dengan Komponen Cadangan yang dapat dimobilisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum dapat berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diatur lagi dengan Undang-Undang. Padahal kesiapan pengelolaan sumber daya nasional dalam bidang pertahanan merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dapat terwujud dan diaplikasikan sehingga terbangun daya saing bangsa dibidang pertahanan dalam kancah internasional.

Gambar 1: Elemen Sumber Daya Pertahanan



Sumber : Buku Strategi Pertahanan Indonesia tahun 2015

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta seharusnya mampu mengatasi ancaman militer maupun non militer. Baik ancaman militer maupun nonmiliter dapat mengganggu dan mengancam kepentingan nasional, bahkan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa berbangsa dan bernegara.

Sehingga dari latar belakang yang diuraikan diatas, diperlukan suatu upaya penataan sumber daya pertahanan untuk mendukung sistem pertahanan negara. Melalui potensi sumber daya pertahanan untuk pertahanan negara yang dimiliki oleh Indonesia apabila sumber daya pertahanan tersebut dikelola dengan baik dengan suatu peraturan perundang-undangan maka akan menjadi elemen kekuatan bangsa yang pada akhirnya tercipta daya saing bangsa.

Urgensi Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Untuk Pertahanan Negara

Bangsa Indonesia telah mencatatkan dalam sejarah sebagai bangsa yang patriotis dan militan dalam mencapai tujuannya. Perang mempertahankan kemerdekaan adalah buktinya. Dalam perang mempertahankan kemerdekaan telah terbukti bahwa kekuatan persenjataan dan pasukan profesional yang dimiliki penjajah dapat dikalahkan oleh semangat dan persatuan seluruh rakyat yang didukung pengerahan seluruh sumber daya nasional mulai dari tentara, laskar-laskar rakyat, serta segenap sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki ditata dalam sistem bahu membahu menjadi kekuatan pertahanan yang komprehensif. Kesemestaan merupakan bukti untuk meningkatkan kemampuan

pasukan milisi yang sejajar dengan pasukan militer profesional. Sehingga kesemestaan merupakan keunggulan yang harus tetap dipelihara menjadi sistem baku bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara (Ditjen Pothan Kemhan, Naskah Akademik RUU PSDN, 2019 : 18).

Indonesia telah mendeklarasikan kesemestaan dalam sistem pertahanan negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (2) yang menyatakan : "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Selanjutnya dalam ayat (5) diamanatkan bahwa susunan dan kedudukan TNI-POLRI dalam menjalankan tugasnya serta

syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara harus diatur dalam undang-undang.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar, masing-masing institusi telah memiliki dasar peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang lahir bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Namun, undang-undang mengenai keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara belum ada yang mengaturnya. Padahal pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia belum sempurna, hanya kekuatan utama yang memiliki kesiapan gelar, sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung belum ditata sehingga menjadi kelemahan sistem pertahanan semesta yang akan dibangun (DKS Nugraha, 2014).

TNI sebagai komponen utama harus mendapat dukungan dari segenap rakyat sebagai tulang punggung pertahanan. Hal ini penting bagi TNI karena episentrum kekuatan TNI tidak hanya pada tentara profesional dengan senjata yang canggih, akan tetapi juga pada kemandirian TNI dengan rakyat. Sehingga dengan terbangunnya Komponen Cadangan maka jumlah tentara reguler sebesar 476 ribu akan mendapat tambahan kekuatan potensi cadangan sejumlah 130 juta jiwa (*Global Power military power index*).

Pembentukan Komponen Cadangan yang diawali dengan pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan upaya penyaluran potensi militansi yang dimiliki oleh rakyat sehingga akan terhimpun

kekuatan yang bermanfaat bagi kepentingan negara. Penyaluran potensi militansi ini sangat penting sebab jika negara abai, maka proses indoktrinasi dan penanaman paham akan dilakukan oleh berbagai kelompok/golongan dengan berbagai pemahaman ideologi yang terkadang kontra produktif dengan kebhinekaan. Saat ini banyak muncul organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan yang bersifat kesukuan atau kelompok/golongan. Potensi rakyat tersebut harus ditanamkan nilai-nilai Bela Negara sehingga dapat disatukan visi kenegaraannya dan sewaktu-waktu negara membutuhkan maka dapat bermanfaat bagi negara (Loc.cit.:45).

Tujuan pembentukan Komponen Cadangan dengan Komponen Pendukung yang dibentuk dengan kesadaran bela negara adalah untuk melipatgandakan kekuatan utama pertahanan negara. Selain itu juga pengelolaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung akan menjadi aspek strategis bagi ketahanan bangsa. Aspek strategis tersebut meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan (Ibid).

Komponen Cadangan berbeda dengan wajib militer walaupun dilatih secara militer. Untuk menjadi Komponen Cadangan, warga negara yang telah cukup umur mendaftar secara sukarela. Selanjutnya bila memenuhi persyaratan warga negara tersebut akan mendapatkan latihan dasar kemiliteran, setelah dinyatakan lulus barulah warga negara tersebut ditetapkan menjadi komponen cadangan. Komponen Cadangan tetap berstatus sebagai warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia.

Secara anggaran pembentukan Komponen Cadangan akan mengeluarkan anggaran negara yang lebih sedikit bila dibandingkan harus membentuk personil tentara reguler, sebab negara bertindak selektif dan hanya memilih warga negara yang potensinya sesuai dengan format sistem perang yang telah direncanakan. Namun demikian, fungsi Komponen Cadangan tetap memiliki kontribusi kekuatan yang cukup signifikan terhadap pertahanan.

Di era globalisasi yang ditandai dengan cepatnya arus informasi yang membuat dunia semakin transparan dan seakan tanpa batas (*borderless*) menjadi pendorong perubahan secara cepat dan drastis dalam semua sendi dan lini kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali Indonesia. Dengan letaknya yang strategis Indonesia harus mampu mentransformasikan kekuatan dan pengaruh dari luar yang bersifat peluang untuk menjadi kekuatan nasional dan pengaruh buruk yang bersifat kendala harus dapat diatasi (Arief Wahyu, www.kemhan.go.id/poahan/wpcontent/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM_majalah.pdf).

Mencermati kondisi kesiapan Komponen Cadangan saat ini dihadapkan pada hakekat ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, maka perwujudan Komponen Cadangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana harus segera terwujud.

Penerapan Penyelenggaraan Komponen Cadangan di Negara Lain

Komponen Cadangan sudah lama ditetapkan di negara-negara lain, dan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kekuatan militer. Di negara lain Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung merupakan satu kesatuan disebut sebagai Komponen Cadangan. Masing-masing negara di dunia ini menggunakan istilah dan metode rekrutmen, pengorganisasian, tugas dan fungsi, cakupan materi

person who has served in the armed forces and it then on a reserve list for a specific number of years" (George Usher, 2006 : 208).

Contoh beberapa negara yang menggunakan Komponen Cadangan dalam bidang pertahanan antara lain:

a) Amerika Serikat

Untuk menjadi Komponen Cadangan, seorang warga negara diwajibkan untuk mengikuti minimal 39 hari pelatihan militer, termasuk latihan fisik selama akhir minggu

apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat nasional.

Amerika Serikat membangun kekuatan cadangan hanya dengan 1,6 % dari total anggaran pertahanan akan tetapi kontribusi kekuatan cadangan sebesar 49% kekuatan pertahanan USA. Rusia membangun kekuatan cadangan hanya 1,8 % dari anggaran pertahanan tetapi kontribusi kekuatan yang diberikan mencapai 38%, China dengan 2,1 % anggaran menyumbangkan 45 % kekuatan pertahanan (*Global Power military power index*).

Tabel 1.1 Perbandingan Kekuatan Komponen Cadangan Amerika Serikat, Rusia, dan Cina
(Diolah dari data Global Fire Power di <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp>)

Negara	Personel Aktif (Active Frontline Personnel)	Komponan Cadangan (Reserved Personnel)	Tenaga Pendukung (Fit For Services)	Anggaran Pertahanan (Defense Budget in USD)
USA	1.281.900	860.000	119.664.970	716.000.000.000
Tiongkok	2.333.000	2.300.000	618.588.627	224.000.000.000
Rusia	1.013.628	2.572.500	46.658.907	44.000.000.000

Sumber : Diolah dari data Global Fire Power

undang-undang, dan subyek tentang cadangan pertahanan negara sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing. Dalam konteks pertahanan, dunia internasional sering menyebut komponen cadangan sebagai *military reserved*. Dalam *Dictionary of British Military History (2nd edition)* digunakan istilah *reservist* dengan definisi: "A member of the armed force who can be called upon for active service in time of war. A reservist is often a

dan lima belas hari latihan rutin setiap tahun. Selain ditata, dilatih, dan dipersenjatai seperti anggota militer aktif, Komponen Cadangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan komponen utama karena mereka hanya bisa beroperasi di bawah kondisi, hukum, peraturan, dan kebijakan tertentu. Adapun tujuan dari Komponen Cadangan AS adalah untuk menyediakan sumber daya yang terlatih dan berkualifikasi

b) Korea Selatan

Korea Selatan menerapkan wajib militer bagi rakyat laki-lakinya. Hal tersebut diatur di dalam Konstitusi Republik Korea, Bab 2 ayat 39 yang mengharuskan setiap laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan yang berusia 18 hingga 35 tahun untuk mengikuti wajib militer, baik itu program militer aktif maupun nonaktif. Program aktif antara

lain adalah 21 bulan di kesatuan Angkatan Darat atau Marinir, 23 bulan di Angkatan Laut, dan 24 bulan di Angkatan Udara. Sementara itu, program nonaktif adalah bekerja di sektor pelayanan publik antara 24 hingga 36 bulan.

c) Filipina

Komponen Cadangan dikenal di Filipina meski dengan bahasa yang berbeda. Komponen Cadangan terdiri dari 2 bagian: *Auxiliary Reserve Units* yang direkrut dari kaum sipil yang bekerja disektor publik. Kedua, *Citizens Armed Forces Geographic Units (CAFGUS)* yang direkrut dari penduduk sipil biasa. *CAFGUS* itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi *non-active military reserve* dan *militia units* (kelompok paramiliter) yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas *counter-insurgency*. Khusus untuk *Auxiliary Reserve Units* (yang merupakan salah satu komponen didalam *reserve forces*), anggota-anggotanya diangkat dari kalangan sipil tetapi yang bekerja disektor publik (pegawai negeri). Unit ini memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi tentara regular (Propatria, 2003).

d) Malaysia

Di Malaysia pelibatan warga Negara dalam bela Negara dikenal dengan nama Program Latihan *Khidmat* Negara (PLKN) atau *Malaysian National Service*. Landasan pembentukan Bela Negara berupa wajib militer di Malaysia pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan satu kesatuan sebagai warga Negara Malaysia. Hal ini terjadi karena kuatnya politik ras dalam paradigma pembangunan Malaysia yang memberikan fasilitas yang lebih kepada kalangan pribumi/ bumiputra. Pelatihan berupa wajib militer di Malaysia dilakukan selama 3 bulan di *camp* pelatihan fisik dimana diisi oleh anak-anak muda dari berbagai etnis. Total waktu pelatihannya sendiri mencapai 9 bulan dan dapat diperpanjang 2 tahun (J Soedjati Djiwandono, 1996 : 33).

Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Dalam rangka melaksanakan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, yang akan melibatkan seluruh sumber

daya nasional. Maka pelibatan seluruh komponen sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. Mencermati kondisi kesiapan sumber daya pertahanan saat ini dihadapkan pada hakekat ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, maka perwujudan Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan yang handal yang dapat meningkatkan daya saing bangsa terdiri dari: sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana.

Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian sumber daya pertahanan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dapat dilakukan melalui:

- pendidikan kewarganegaraan;
- pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- pengabdian sesuai dengan profesi.

Usaha pembelaan negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan perlu dibangun dan dikembangkan secara berlanjut dan terarah agar dalam pengerahan dan penggunaan kesiapannya dapat terwujud. Usaha-usaha tersebut



Sumber : Biro Humas Kemhan



Sumber : Biro Humas Kemhan

dapat melalui pembinaan dan pembangunan. Pembinaan sumber daya manusia meliputi pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan. Pembinaan kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kesadaran bela negara dengan jumlah yang proporsional. Sedangkan pembinaan kemampuan diharapkan sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan sesuai dengan profesinya masing-masing dan searah dengan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan komponen cadangan (Arief Wahyu, www.kemhan.go.id/poahan/wpcontent/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM_majalah.pdf).

Kemudian langkah pembangunan sumber daya manusia yang meliputi pembangunan fisik, mental, kecerdasan dan keterampilan. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan sebagai pembentukan dasar kepribadian harus menggambarkan dan mengakar pada budaya bangsa sehingga akan membentuk kepribadian yang mampu diandalkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen cadangan.

Sumber Daya Alam

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tersebut seharusnya dapat digunakan untuk penguatan sumber daya pertahanan. Untuk dapat memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada memerlukan pengamanan dan pengelolaan.

Pengamanan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan komponen utama maupun cadangan adalah terjaganya kerahasiaan terhadap Kontur Dasar Laut dan Karakteristik Air Laut dari pantauan asing/pihak luar, namun bermanfaat bagi ekonomi dan pertahanan negara Indonesia. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan secara terintegrasi.

Sumber Daya Buatan

Sumber daya buatan merupakan modal dasar pembangunan nasional dan daerah harus didayagunakan dalam rangka memenuhi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Oleh karena itu pemanfaatannya harus terarah dengan memperhatikan kelestarian sumber daya akan lingkungan, untuk itu perlu ditinjau aspek pengamanan dalam pendistribusian dan pengaturan dalam pengelolaannya.

Sarana dan Prasarana Nasional

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah difokuskan untuk meningkatkan perekonomian, oleh karena itu pembangunan sarana prasarana diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan. Untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kedepan agar mengacu kepada kepentingan pertahanan negara, sehingga sarana prasarana yang ada pada masa damai dapat digunakan untuk kepentingan umum, dan pada saat perang dapat meningkatkan kemampuan TNI sebagai komponen utama.

Pengelolaan sarana prasarana sebagai bagian dari komponen cadangan walaupun belum didukung oleh perundang-undangan yang mengatur, maka sarana prasarana sebagai komponen cadangan perlu di inventarisir dan di uji coba sehingga perwujudan kesiapan sarana prasarana dapat dilaksanakan.

Kesimpulan

Sejarah telah membuktikan bahwa sistem pertahanan semesta merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus dipelihara untuk menjadi rujukan serta sistem yang baku bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kesemestaan ini juga termaktub dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (2). Namun keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara belum diatur dalam undang-undang. Padahal pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia belum sempurna, hanya kekuatan utama yang memiliki kesiapan gelar. Sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung belum ditata sehingga menjadi kelemahan sistem pertahanan semesta yang akan dibangun.

Berkebalikan dengan Indonesia beberapa negara telah mengatur keterlibatan rakyat sipil dalam usaha pertahanan negara, sebagai contoh Amerika Serikat, Russia, Cina, Malaysia dan Filipina yang membangun kekuatan komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama mereka. Tujuan pembentukan komponen cadangan ini adalah untuk menyediakan sumber daya yang terlatih dan berkualifikasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat nasional.

Menanggapi hakekat ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, Indonesia juga harus segera membangun Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan menjadi *deterrent*

effect bagi negara lain yang mencoba melakukan konfrontasi baik secara militer maupun nonmiliter. Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan yang handal dan yang dapat meningkatkan daya saing bangsa terdiri dari: sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana.

Rekomendasi

Kesemestaan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan dan diterjemahkan agar memberi dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara namun masih dalam bingkai demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan supremasi sipil. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang saat ini sedang dilakukan harmonisasi antara pemerintah dan DPR merupakan sebuah langkah yang strategis bagi penguatan sistem pertahanan negara dan mewujudkan sistem pertahanan semesta yang diamanatkan dalam UUD.

Pemerintah perlu melihat potensi sumber daya manusia Indonesia yang besar sebagai sebuah potensi untuk memperkuat pertahanan negara. Pembentukan komponen cadangan yang didahului dengan Pendidikan Kesadaran Bela Negara merupakan upaya penyaluran potensi militansi yang dimiliki oleh rakyat sehingga akan terhimpun kekuatan yang bermanfaat bagi kepentingan negara.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan yang handal dan yang dapat meningkatkan daya saing bangsa yang terdiri dari: sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana perlu dilakukan pembinaan, pembangunan, pengamanan, penguatan dan pengelolaan unsur-unsur sumber daya nasional yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.^{***}

Daftar Pustaka

- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Defending the Country Entering the 21st Century*, Jakarta: Dephan, 2003.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008*, Jakarta: Dephan, 2008.
- Ditjen Pothan Kemhan, *Naskah Akademik RUU PSDN*, Kementerian Pertahanan RI, 2019
- Djiwandono, J Soedjati, *Konsep Keamanan: Pengalaman Indonesia dalam Bantarto Bandoro* (ed), *Agenda dan Penataan Keamanan Asia Pasifik* (Jakarta: CSIS, 1996)
- Forum untuk Reformasi Demokratis, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu, 2000.
- George Usher, *Dictionary of British military history, 2 edition*, (London: A&C Black Publisher, 2006)
- J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, PPSN: 2009.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih pertahanan Indonesia tahun 2015*, Jakarta: Kemhan 2014.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara Tahun 2015*, Jakarta; Kemhan 2014.
- Lukum, Roni, *Upaya Peningkatan Pemahaman Wawasan Nusantara Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Bagi Warga negara Indonesia*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2005.
- Nasution, Abdul Haris, *Pokok-Pokok Perang Gerilya*, Edisi 4, *Pustaka Narasi*, 2014.

- Nugraha DKS, *Bela Negara di era Global*, (Jakarta : *Center for Strategic and Defence Studies UI*, 2014)
- Ó Tuathail, Gearoid ,*Geopolitics Reader*, routledge, 2006.
- Pemerintah AS, *"Title 10 of the United States Code"*, sub bab E, 10 Agustus 1956.
- Prabowo, J. Suryo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, PPSN, 2009)
- Propatria, *Perbandingan Komponen Cadangan Nasional di Beberapa Negara*, 23 April 2003.
- **Jurnal/Artikel:**
- *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen* .Volume IV. No.23.Mei-Juni 2008, CSICI, 2008.
- Natalegawa, Marty, *An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific*, pidato dalam Conferene on Indonesia di Washington DC, 6 Mei 2013.

Website:

- Global Fire Power, 28 Mei 2015, <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp>
- Global Firepower, "Singapore Military Strength," 28 mei 2015, http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=singapore
- Arief Wahyu, *Penataan Komponen cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara*, diakses melalui https://www.kemhan.go.id/pothan/wpcontent/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM_majalah.pdf.

MEMBANGUN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMPONEN UTAMA MENGHADAPI ERA PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA KONDISI KEKINIAN

Oleh:
Brigjen TNI Raden Tjahya Komara
Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan

"Bagaimana meletakkan pondasi besar arah kebijakan pertahanan negara dengan menata ulang sistem pembangunan maupun pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Utama menghadapi era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian?"

Pendahuluan

Sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan : bahwa sistem pertahanan bersifat semesta (Sishanta). Kesemestaan dalam pertahanan negara yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Pemikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Dengan demikian

ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dan pondasi dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara.

Di sisi lain, Doktrin pertahanan merupakan panduan bagi penyusunan strategi pertahanan yang didefinisikan oleh NATO sebagai *"fundamental principles by which military forces guide their actions in support of objectives"*. Doktrin Pertahanan Negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari : (a) perspektif bangsa tentang perang; (b) komponen negara yang terlibat perang; (c) pemegang kendali perang; (d) mekanisme pertanggungjawaban; (e) strategi perang; dan (f) terminasi perang.

Menyikapi hal di atas, tentunya dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan suatu kebijakan untuk mewujudkan pertahanan negara yang kokoh, kuat dan tangguh tentu

perlu strategi yang dibangun dengan menggabungkan tujuan (*ends*), cara (*ways*), dengan sarana (*means*) agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan kepentingan.

Menurut para ahli, dampak *"Contagion Effect"* atau efek penularan dari krisis finansial/keuangan oleh suatu aktor global yang bercorak anarkis dan cenderung destruktif akan berpengaruh stabilitas keamanan suatu kawasan atau wilayah. Maka kebijakan tujuan dan kepentingan pertahanan negara tersebut, sudah selayaknya dilakukan secara komprehensif, bersifat kodifikasi maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan kondisi kekinian dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas doktrin militer yang berlaku.

Pada Era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian yang diwarnai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangatlah mempengaruhi dan memberi dampak

yang bersifat negatif pada konteks pola, sifat dan bentuk ancaman baru bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berkaca dari berbagai perkembangan dan dinamika kondisi kekinian tersebut, baik secara global, regional maupun nasional tentunya akan pengaruh bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara baik bersifat positif maupun bersifat negatif.

Berbicara pola, sifat dan bentuk ancaman-ancaman baru ke depannya dapat dilihat salah satunya melalui dunia siber (*cyber space*) yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non negara. Bentuk ancaman siber ini sangatlah sulit diantisipasi dan diprediksi, dinamis, dan cepat berubah, serta penuh dengan ketidakpastian. Hal ini menunjukkan karena sifatnya yang nonkonvensional, tidak mengenal front dan dimensi sasaran sangat luas.

Oleh karena itu kapabilitas pertahanan negarapun harus dibentuk

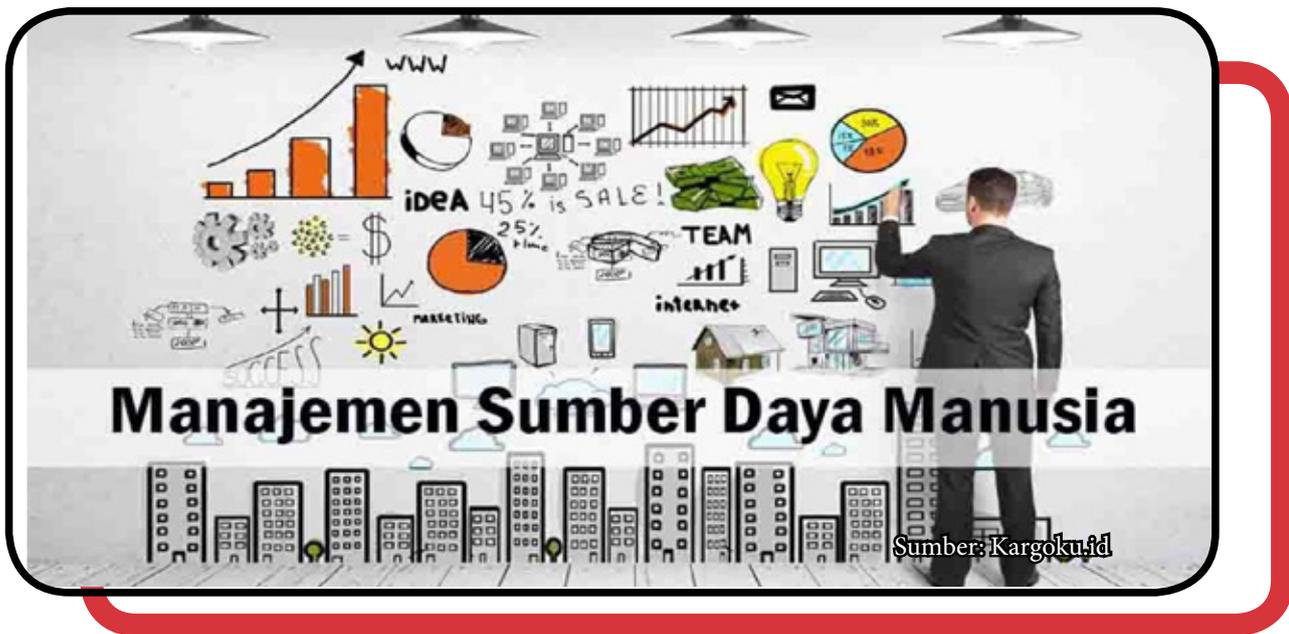
serta harus mampu menghadapi segala pola dan bentuk ancaman baru secara terorganisir, terstruktur, terencana dan kesiapsiagaan serta penggunaan maupun pengerahan militer.

Sementara itu saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pertahanan Negara, diantaranya adalah (1) Basis-basis kekuatan militer merupakan peninggalan masa kolonial yang dibangun dengan pertimbangan lingkungan strategis masa tersebut, adanya perubahan situasi keamanan strategis diperlukan tinjauan strategis terhadap disposisi kekuatan militer Indonesia, (2) Koherensi strategi dan kebijakan pertahanan masih menjadi sebuah persoalan besar, karena setiap pemangku kepentingan cenderung memiliki prioritas yang berbeda, (3) Kapabilitas pertahanan yang dihadapkan pada letak geografis. Kehadiran komponen utama (TNI) di seluruh wilayah NKRI harus dijaga, karena ketidakhadiran TNI

dalam sebuah wilayah akan dapat berkembang menjadi *ungoverned territory* dan dipandang sebagai *safe haven* bagi teroris/separatis, (4) Peningkatan peran TNI yang profesional belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang selayaknya melekat. Pasalnya berbagai tuntutan tugas prajurit TNI membutuhkan kesejahteraan yang lebih komprehensif agar dapat melaksanakan tugas utama secara lebih profesional dan melaksanakan tugas-tugas lain di luar kompetensi utamanya, (5) Ragam Alutsista yang memiliki filosofi teknologi yang berbeda serta berimplikasi pada aspek pemeliharaan, pengoperasian, efisiensi dan efektifitas yang akan mengakibatkan rendahnya derajat interoperabilitas alutsista, (6) Industri Pertahanan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, tetapi juga akan meningkatkan survivabilitas industri pertahanan. Namun industri pertahanan dalam negeri masih belum optimal melakukan investasi



Sumber : Biro Humas Kemhan



dalam pengembangan riset ilmu-ilmu dasar dalam menunjang industri pertahanan (7) Intelijen, Penginderaan, Pengamatan dan Pengawasan dalam konteks peringatan dini (*early warning*) dipandang masih belum berjalan optimal yang berdampak pada pelanggaran wilayah, dan (8) Dukungan energi dalam mendukung operasi TNI semakin tinggi membebani anggaran serta (9) Penguatan peran unsur-unsur militer diplomasi luar negeri belum sepenuhnya optimal untuk dapat menjamin kedaulatan wilayah dan menjamin keselamatan para Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negara-negara rawan konflik.

Institusi atau organisasi TNI beruntung, ditengah permasalahan dan tantangan pertahanan negara bila masih (tambahan) bisa membangun kapabilitas SDM prajurit TNI memiliki karakter Tanggon, Tanggap dan Trengginas yang selalu melekat di dalam diri setiap prajurit, dan akan

selalu siap melaksanakan tugasnya di dalam medan dan situasi apapun. Seperti diketahui bahwa prajurit Tanggon yang memiliki kepribadian dengan mental yang membaja, tangguh, ulet dalam segala usaha untuk mewujudkan keinginannya). Tanggap yang memiliki intelektualitas yang tinggi, keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme) dan Trengginas yang memiliki fisik dalam arti luas bisa mengemban tugas-tugas di berbagai medan, situasi, di berbagai keadaan. Hal tersebut tercermin pula dalam Tri Pola Dasar Pendidikan yaitu memiliki sikap dan perilaku, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta memiliki Jasmani yang sehat.

Hal ini seiring dengan apa yang dijelaskan dalam Teori (konsep) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), menyatakan : Tanpa Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, sulit bagi negara untuk mencapai kemajuan yang cepat. Sementara peningkatan mutu SDM

hanya dapat dilakukan dengan perencanaan SDM yang baik dan benar (Drs. H . Malayu S. P . Hasibuan, 2001 ; 255).

Oleh karena itu Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan merupakan investasi dan aset bagi institusi atau organisasi yang sangat bernilai tinggi, karena dijadikan sebagai penggerak untuk mencapai arah, tujuan dan sasaran dari suatu institusi atau organisasi tersebut. Faktor kepentingan SDM juga akan melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung menyangkut desain dan implementasi sistem manajemen, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengelolaan, evaluasi kinerja, kompensasi dan tata hubungan kerja.

Namun kini terdapat hal yang cukup merepotkan diantaranya adalah memposisikan kapabilitas

SDM TNI (prajurit) dalam institusi atau organisasi sebagai alat pertahanan secara : Pertama : Profesionalisme adalah kemampuan sesuai bidang tugas dengan kriteria keahlian (*Expertise*) dalam suatu bidang tertentu yang melalui pendidikan dan kemudian dikembangkan melalui pengalaman maupun kerjasama (*Cooperativeness*) sebagai bagian dari kesatuan organik yang membedakannya dari kelompok sosial lain, dan rasa tanggung jawab (*Responsibility*) untuk menggunakan keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih luas.

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Profesi merupakan pekerjaan khusus, seorang profesional tidak melakukan berbagai macam pekerjaan (pekerjanya memerlukan kepakaran yang khas), profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus. 2) Profesional memerlukan pendidikan dan latihan yang lama dan intensif untuk memelihara, meningkatkan dan

menguatkan tingkat profesionalisme (sebagai seorang profesional tidak boleh melakukan banyak jenis pekerjaan), 3) Pekerjaan itu dinilai atas dasar pelaksanaannya, metode dan standar yang ditentukan oleh lembaga, orang atau kawan seprofesi, dan 4) Keabsahan wewenang seorang profesional berdasarkan keahliannya sesuai badan-badan profesional terkait, serta 5) Profesional memiliki tanggung jawab yang tinggi (bagi TNI : melindungi masyarakat, bangsa dan negara),

Sedangkan Kedua : Proporsional (berasal dari kata proporsi atau sebanding/seimbang/berimbang) adalah sesuatu yang tidak melewati ambang batas kewajaran dan juga merupakan cerminan seseorang yang harus dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik. Maka proporsional dapat dimaknai perlu memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur kemampuan dan kategori job, tugas dan fungsi organisasi yang ada

secara seimbang. Dengan demikian, penempatan SDM dalam wadah suatu organisasi haruslah seimbang dalam berbagai unsur dan ukuran serta komposisi di dalam institusi atau organisasi tersebut.

Namun melihat realitas data dan fakta, bahwa pemahaman dalam ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi dalam mewujudkan suatu kapabilitas SDM prajurit dihadapkan pada ancaman baru sebagai dampak dan pengaruh era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian. Dalam implementasinya kapabilitas SDM prajurit yang profesional dan proporsional dalam institusi atau organisasi memiliki beberapa kendala : (1) pembangunan dan pengembangan SDM prajurit belum mendapatkan skala prioritas yang seharusnya menjadi concern dan keprihatinan khusus para *stakeholders*. Dalam *good governance*, kapabilitas SDM merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi. Sementara prinsip-



Sumber : Biro Humas Kemhan

prinsip *good governance* antara lain: adanya partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis, sedangkan (2) pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI masih berpedoman dan bertumpu pada kebijakan *zero growth* dan *right sizing*, keterbatasan SDM prajurit TNI di bidang *Information and Technology (TI)*, hal ini terlihat dari data Peserta Tugas Belajar Program studi Teknik Elektronika dan Informatika yang jumlahnya sangat minim.

Berpijak pada uraian di atas, dari sudut pandang urgensi dan permasalahan pokok, maka yang menjadikan pertanyaannya adalah “Bagaimana meletakkan pondasi dasar arah kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Utama (Prajurit TNI) dalam menghadapi ancaman baru sebagai dampak maupun pengaruh era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian”

Kebijakan di bidang SDM merupakan salah satu bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan arah kebijakan pengelolaan Sumber Daya Pertahanan. SDM merupakan faktor kunci kemajuan institusi atau organisasi sehingga perlu mendapat perhatian serius dengan upaya nyata dan terencana dengan mengedepankan skala prioritas, sasaran dan tujuan secara konsisten dan fokus, melalui tata kelola manajemen pembangunan dan pengembangan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Langkah tersebut, diperlukan untuk peninjauan, evaluasi dan penataan ulang arah kebijakan pembangunan dan pengembangan SDM Komponen Utama (TNI). Khususnya dari kesiapan

dalam menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat dan telah mengalami lompatan besar, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara penuh.

Bersandar dari tuntutan tersebut maka SDM Komponen Utama TNI harus mampu merespon era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian, yaitu era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi dimana perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik serta pertahanan.

Salah satu pilar penting dalam menghadapi tantangan dan kondisi terkini adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini sangat beralasan dikarenakan berdampak pada penguasaan tingkat kesiapan operasional dan efektivitas militer. Berbagai alutsista dan infrastruktur militer penunjang kini telah menerapkan dan didukung dengan teknologi *Internet of Things (IoT)* dan teknologi *Big Data* yang sangat membantu perencanaan tugas militer, operasi militer maupun untuk efektivitas anggaran militer suatu negara.

Disamping itu pada era ini semakin terlihat wujud dunia telah menjadi kampung global yang terjadi karena revolusi digital, maka perkembangan dunia militerpun sangat terkait dengan dunia industri digital mencakup berbagai jenis teknologi termasuk industri pertahanan yang telah menggunakan teknologi

digital guna lebih efektif, efisien dan produktif.

Jawaban Persoalan Arah Kebijakan Pengembangan SDM Prajurit TNI

Kembali pada pokok persoalan tentang kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Utama (Prajurit TNI) di atas, maka jawaban dari arah kebijakan pembangunan dan pengembangan SDM Prajurit TNI dalam menghadapi ancaman baru tersebut sebagai dampak maupun pengaruh era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian, adalah :

Pertama, pembangunan SDM komponen utama (prajurit TNI) disiapkan sedini mungkin secara komprehensif, sinergis dan terkoordinasi melalui kerjasama secara terpadu pada aspek tataran pengadaan (rekrutmen) dalam setiap tingkatan. Mulai dari yang paling dasar yaitu pendidikan umum (Sekolah Menengah Atas / SMA unggulan) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI (SMA Taruna Nusantara, SMA Taruna Nala, dan SMA Pradhita Dirgantara), hingga tingkat sarjana melalui pengadaan Perwira Prajurit Karir selain itu Sarjana Teknik Elektro, Informatika dari ITS, ITB dan Universitas lainnya. Selain itu pada tingkat selanjutnya yaitu melalui pemberian Program Beasiswa jenjang S2 dan S3 secara linier.

Kedua, pengembangan SDM Komponen Utama (TNI) yang mampu mengawaki dan mengoperasikan seluruh alutsista terkini TNI dengan teknologi serba canggih. Alutsista TNI canggih yang dioperasikan dan dikontrol secara digital sesuai dengan tantangan era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian yang fokus mengembangkan teknologi



Sumber: Biro Humas Kemhan

informasi dan komunikasi. Oleh karena itu kebijakan pengembangan SDM Komponen Utama (TNI) sebagai bagian lanjutan dengan mengedepankan pendidikan lanjutan (S2 maupun S3) secara linier. Kapabilitas dan kompetensi SDM prajurit TNI di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai kunci keberhasilan menjalankan tugas dalam era digitalisasi mesin perang. Hal ini sejalan dan bertujuan untuk mendukung kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang semakin canggih dan bernilai ekonomi tinggi.

Setiap kebijakan perlu tindakan lebih lanjut yang bersifat komprehensif, terkoordinasi dan sinergi, agar seluruh kebijakan terintegrasi dengan baik, sehingga sasaran dan tujuan setiap kebijakan pembangunan pertahanan dapat tercapai. Disamping itu kebijakan pengembangan SDM TNI pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga perlu membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan negara lain terutama negara maju dalam bidang Pendidikan.

Ketiga, pembangunan dan pengembangan SDM komponen utama (prajurit TNI) sebagai kekuatan militer disesuaikan dengan tatanan strategi militer. Era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian dengan berbagai dampaknya secara positif maupun negatif mempengaruhi tata kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengubah seluruh tatanan strategi militer.

Jika dilihat dari dampak negatif berupa bentuk, sifat dan pola suatu ancaman, maka seluruh tatanan strategi militer perlu dirubah seiring perkembangan terkini yang diwarnai dengan era revolusi Industri dari 1.0 yang terus mengalami perubahan hingga saat ini 4.0. Implikasi dari perubahan strategi militer tentunya sejalan juga dengan perubahan Postur militer dan Doktrin militer. Memasuki era revolusi Industri 4.0 perlu penyiapan SDM yang mampu menangkap peluang bukan justru sebaliknya tergilas oleh

perubahan dan perkembangan yang terjadi, apalagi di organisasi yang sangat strategis seperti organisasi militer termasuk TNI.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan SDM komponen utama (prajurit TNI) yang bersifat strategis sehingga perlu mempertimbangkan dan berorientasi jangka panjang (*long term oriented*), serta responsif terhadap segala macam perubahan. Era Revolusi Industri 4.0 juga menyebabkan terjadinya *Revolutionary in Military Affairs (RMA)* yang berimplikasi pada perubahan strategi perang dan taktik tempur dalam dunia militer. Salah satunya penggunaan teknologi sistem deteksi dan persenjataan modern menuntut SDM Komponen Utama memiliki kompetensi akademik dan keterampilan yang tinggi, juga mengharuskan adaptasi yang lebih cepat dan berevolusi melakukan perubahan besar agar lebih responsif dan dapat fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman.

Keempat, pembangunan dan pengembangan SDM komponen utama (prajurit TNI) harus berbasis teknologi digital, big data, dan *artificial intelligence* untuk menghadapi peluang dan tantangan era Revolusi Industri 4.0. Kebijakan ini akan dapat membantu agar mampu memahami dan menguasai situasi dan kondisi dengan dinamika lingkungan strategis dan perubahan geopolitik dengan cepat. Organisasi militer di era terkini yang diwarnai berbagai kemajuan dan sekaligus menghadirkan beragam ancaman membutuhkan *stakeholder* yang memiliki kemampuan *leadership agility* yang menyadari bahwa kita hidup dalam era perubahan yang permanen, dan tidak berdiam diri membiarkan organisasinya tergulung dalam arus perubahan.

Oleh karena dibutuhkan kebijakan peningkatan kapabilitas SDM sesuai kompetensi maupun kapasitas dalam menguasai teknologi persenjataan dan melakukan perubahan yang mampu mengelaborasi ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi.

Jika menilik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah Perpres yang mengimplementasikan lahirnya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan maupun Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1035/XII/2014 tentang *Road Map* reformasi birokrasi Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019, bahwa era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian dengan dampak dan pengaruh negatif oleh adanya perkiraan ancaman baru yang tentunya berimplikasi dengan adanya kebijakan restrukturisasi, reorganisasi, revitalisasi dan pembentukan organisasi baru dilingkungan TNI.

Berdasar kondisi tersebut rasanya sudah kurang logis juga bahwa pembangunan pertahanan diarahkan kepada sasaran kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force / MEF*). *MEF* TNI melahirkan kebijakan berlandaskan kepada 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan organisasi, kebijakan bidang alutsista dan kebijakan bidang personel (SDM).

Khusus pada ranah kebijakan bidang personel (SDM) melalui Kebijakan *zero growth* (*zero growth policy*) atau kebijakan penambahan personel sebesar nol persen (0%) atau personel yang direkrut akan sama dengan yang memasuki masa pensiun, dan kebijakan ketepatan postur

atau tepat ukuran (*Right Sizing*). Pada tataran kebijakan *Zero Growth of Personel (ZGP)* TNI dan *Right Sizing* dalam kerangka *MEF* dirasakan akan membelenggu penataan dan penguatan Organisasi. Hal inilah yang seyogyanya menjadi dasar pemikiran penyusunan kebijakan pembangunan maupun pengembangan SDM prajurit ke depan dengan arah Kebijakan : Alternatif Pertama : *Ideal growth* (*ideal growth policy*) atau penambahan menuju ideal, namun yang menjadi persoalan adalah ukuran angka ideal yang perlu rumusan secara *Exact*, sehingga dapat dijadikan ukuran capaiannya. Alternatif Kedua : *Propotional growth* (*Propotional growth policy*), pada *alternative* kedua ini agak sedikit luwes atau fleksibel karena tidak mendudukan angka secara *Exact*, mendudukan sesuai kebutuhan dan pengembangan organisasi, namun tetap berpedoman pada efektifitas organisasi.

Sebagai akhir tulisan ini, arah kebijakan pertahanan negara dalam lingkup pengelolaan pembangunan dan pengembangan SDM prajurit TNI sebagai Komponen Utama yang merupakan pilar utama pertahanan negara yaitu: Pertama, menjadi *urgen* dan *concerns* bagi *Stakeholder* dalam mewujudkan suatu kapabilitas SDM prajurit secara Profesional dan Proporsional pada bidang ilmu Pengetahuan (*Knowledge*) dan Keterampilan (*Skill*) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi, Kedua : mendudukan pada aspek pembangunan dan pengembangan SDM prajurit berbasis pendidikan secara *linier* dalam wadah *grand design* pertahanan negara secara utuh yang dapat terimplementasi dalam *Road Map*. Disamping itu juga diperlukan untuk menata ulang dan mengubah arah kebijakan yang mengacu pada *zero growth* dengan kebijakan *ideal growth* (*ideal growth policy*) atau *Propotional growth* (*Propotional growth policy*), dan Ketiga : pembangunan dan pengembangan SDM prajurit TNI diperlukan mengikuti strategi, postur dan doktrin militer dalam wadah organisasi seiring dan sejalan dengan era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian.

Perlu disadari, era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi akan berdampak dan berpengaruh besar terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang perlu diwaspadai adalah sisi negatifnya yang merupakan ancaman baru dengan pola dan bentuk ancaman tersebut sulit diantisipasi, sulit prediksi (*unpredictable*), dinamis, dan cepat berubah karena sifatnya yang nonkonvensional, tidak mengenal *front* dan dimensi sasaran sangat luas serta dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non negara.***

PERAN STRATEGIS UNIVERSITAS PERTAHANAN DALAM MENCETAK SDM PERTAHANAN DENGAN SEMANGAT BELA NEGARA



Sumber: Biro Humas Kemhan

Oleh:
Letjen TNI Dr.Tri Legionosuko, S.I.P., M.A.P.
(Rektor Universitas Pertahanan)

Pendahuluan

Hal yang paling menarik dalam sejarah hubungan internasional adalah hubungan antara sipil dan militer dalam politik dan sistem pemerintahan. Seorang pakar hubungan internasional Samuel Huntington dalam *The Soldier and the State* (1957) menggambarkan hubungan dua entitas tersebut dalam konsep yang disebut dengan *Subjective Civilian Control*, dan *Objective Civilian Control*. Konsep yang pertama menempatkan peran militer dalam ketatanegaraan sangat dominan dan peran sipil sangat terbatas. Situasi seperti ini berlangsung dalam pemerintahan yang bersifat otoriter dan sejarah

dunia mencatat dengan baik contoh-contoh penerapan situasi tersebut di banyak negara. Sebaiknya, pada konsep yang kedua, kebijakan politik negara dikuasai sepenuhnya oleh pihak sipil, dan tentara hanya bekerja dalam bidang penanggulangan ancaman kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara dan bangsa. Militer tidak diperkenankan memasuki wilayah kebijakan publik atau berkiperah dibidang sosial lainnya.

Militer Indonesia, sesuai sejarahnya tumbuh secara alami dalam perjalanan panjang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara

sebelum akhirnya dibentuk menjadi Tentara Nasional. Dalam perjalanan sejarah perjuangannya militer Indonesia tidak pernah berjuang sendiri namun senantiasa berada dalam kerjasama yang sinergis dengan rakyat. Dengan fakta sejarah tersebut maka jatidiri militer Indonesia disebut sebagai tentara rakyat (*People Army*) dan tentara pejuang (*warrior*). Jatidiri sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang tersebut terus berkembang dan membentuk keyakinan yang melembaga dan mengkrystal dalam hati dan pikiran setiap anggota militer Indonesia sehingga melahirkan doktrin pertahanan negara yang kemudian terbentuk dalam sebuah sistem pertahanan

negara bernama Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kekuatan inti dari Sishankamrata tersebut adalah kemanunggalan militer/TNI dengan seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia lahir menjadi sebuah negara bangsa, militer Indonesia selalu aktif dalam mewarnai jalannya pemerintahan negara khususnya dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan nasional. Kecenderungan ini menyebabkan terbentuknya penguatan fungsi kontrol militer terhadap dinamika kondisi sosial politik negara hingga datang era reformasi di tahun 1998. Pada era reformasi tersebut, salah satu agenda yang telah dilaksanakan oleh pihak sipil adalah merumuskan paradigma reformasi militer Indonesia dengan melepaskan fungsi sosial politiknya secara kelembagaan. Namun demikian, hati dan pikiran sebagian elemen masyarakat sipil (politisi) tidak bisa serta merta menghapus kiprah militer Indonesia di luar bidang pertahanan. Beberapa indikator penting yang jelas terlihat adalah masuknya doktrin pertahanan Sishankamrata ke dalam UUD 1945 dan berdirinya Universitas Pertahanan yang mengusung visi Bela Negara dalam konteks Pertahanan Negara.

Dalam konsep bela negara dan pertahanan negara, maka partisipasi setiap warga negara merupakan hak sekaligus kewajiban. Hal tersebut memberikan makna bahwa politisi dan praktisi sipil memberikan legitimasi sosial, hukum, dan akademik terhadap kelangsungan nilai-nilai kemanunggalan militer dengan rakyat. Dalam khasanah internasional sesungguhnya kemanunggalan militer dan rakyat bukanlah suatu perilaku penyimpangan. Beberapa konsep yang sudah lama dikenal

seperti *Civil-Military Cooperation* (Terminologi dari NATO) atau *Civil Military Coordination* (Terminologi dari PBB) merupakan perwujudan dari sinergitas militer dengan masyarakat.

Dalam bidang akademis, sebagai sebuah universitas negeri, Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) membuka kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk menjadi mahasiswa baik militer, Polri, pegawai negeri/swasta, atau pemuda/pemudi dengan memberikan beasiswa penuh. Integrasi berbagai elemen bangsa di Unhan tersebut merupakan wujud peran dan fungsi kelembagaan Unhan dalam membina semangat nasionalisme dan integritas jiwa mahasiswa sebagai representasi dari bangsa Indonesia yang manunggal (Bhinneka Tunggal Ika). Landasan pikiran di setiap aktivitas akademis Unhan dalam melaksanakan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi, adalah tujuan umum institusional (*institutional goal*) Unhan. Unhan berkomitmen menjadi basis akademis bagi penguatan dan pengembangan konsep bela negara dalam rangka mempertahankan keamanan nasional. Unhan menjadi lembaga pencetak calon pemimpin nasional baik militer maupun sipil yang berwawasan bela negara dan pertahanan dalam segala bentuk manifestasinya. Kerjasama kemitraan pun dibangun baik antar lembaga fungsional pemerintah maupun sesama perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

Dengan semangat kemanunggalan antara mahasiswa unsur militer dan mahasiswa unsur sipil di Unhan, akan menjadi miniatur model kemanunggalan militer-rakyat dalam suatu hubungan yang setara, bukan hubungan subordinatif. Kekuatan hubungan kedua unsur tersebut akan terimplementasi mulai

dari pemahaman dan penyusunan konsep ancaman nasional yang kemudian akan menjadi usulan kepada pemerintah tentang kebijakan umum pertahanan keamanan nasional, mengkaji secara bersama tentang strategi dan manajemen pertahanan, serta membahas pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperkuat sistem pertahanan negara secara efektif dan efisien.

Sementara itu, diskursus yang berkembang di masyarakat luas terkait sistem pertahanan negara Indonesia adalah sebagian masyarakat berpendapat bahwa Sishankamrata merupakan pendekatan pertahanan yang hanya sesuai diterapkan pada masa perjuangan melawan penjajah yang memiliki keunggulan teknologi persenjataan, sehingga saat ini sudah tidak relevan. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa karena perkembangan penguasaan teknologi yang demikian pesat maka basis kekuatan pertahanan negara sudah saatnya beralih kepada sistem yang berbasis kesenjataan teknologi (Sistek), sedangkan konsep Sishankamrata masih menekankan kepada kekuatan sistem kesenjataan sosial (Sissos).

Selain daripada itu, dalam Sishankamrata, penggunaan militer lebih banyak berorientasi ke dalam negeri (*Inward looking*), sementara pihak reformis berargumentasi bahwa ancaman keamanan negara tidak lagi bersifat militer semata, maka penggunaan kekuatan militer harus berorientasi ke luar wilayah yurisdiksi nasional (*Outward looking*). Universitas Pertahanan dalam kapasitasnya sebagai lembaga kajian akademis mempunyai kewajiban untuk memberikan berbagai kajian ilmiah terkait isu-isu strategis pertahanan negara dalam rangka memelihara dan menjaga keamanan

nasional. Landasan kajian strategis pertahanan yang dilaksanakan oleh Unhan senantiasa bertitik tolak dari kebijakan politik pertahanan oleh Kementerian Pertahanan dengan penguatan berdasarkan tinjauan akademis.

Hakikat Studi Ilmu Pertahanan

Universitas Pertahanan (Unhan) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. Unhan yang semula berlokasi di daerah Salemba Jakarta Pusat kemudian direlokasi ke kawasan IPSC Sentul, Bogor. Penyelenggaraan proses belajar mengajar di Unhan mengikuti aturan formil akademis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan secara substansial mengajarkan ilmu pertahanan dalam rangka mendukung tugas pokok pertahanan negara. Saat ini di Unhan terdapat 4 fakultas yakni Fakultas

Strategi Pertahanan (FSP), Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP), Fakultas Kemanan Nasional (FKN), dan Fakultas Teknologi Pertahanan (FTP). Total program studi sebanyak 17 prodi.

Ilmu pertahanan yang dikembangkan oleh Unhan adalah ilmu pertahanan yang dikaji dari berbagai sudut pandang yakni militer, politik/hukum, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu konsep pengembangan ilmu pertahanan di Unhan dimulai dari strata pendidikan Magister (S2) dengan asumsi bahwa mahasiswa yang akan masuk Unhan sudah memiliki bekal berbagai disiplin ilmu di strata sarjana (S1) sebelumnya. Berbekal berbagai sumber keilmuan tersebut maka ilmu pertahanan akan mengalami proses pengayaan konseptual secara berkelanjutan sehingga ilmu pertahanan akan menjadi suatu cabang ilmu yang sangat dinamis seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pertahanan di Unhan berlandaskan filosofis Unhan yakni Identitas, Nasionalisme, dan Integritas. Dengan Identitas dimaksudkan bahwa strategi dan sistem pertahanan negara bagi bangsa Indonesia dirajut berdasarkan nilai-nilai dalam sejarah perjuangan bangsa sehingga terbentuk negara dan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perang bagi bangsa Indonesia semata-mata untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. Hakikat sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah perpaduan antara sistem kesenjataan sosial (Sissos) dan sistem kesenjataan teknologi (Sisstek).

Sissos merupakan kekuatan *intangable* bangsa berupa semangat kesatuan dan persatuan sebagai sebuah bangsa, nasionalisme, dan jiwa pantang menyerah. Sisstek merupakan kekuatan *tangible* berupa senjata fisik berteknologi hasil ciptaan manusia. Namun demikian, Sisstek pertahanan



Sumber: Biro Humas Kemhan

Indonesia sebagian besar masih berasal dari pengadaan impor, sementara teknologi dalam negeri belum bisa dipergunakan untuk menahan serbuan konvensional musuh. Oleh sebab itu sissos masih merupakan pondasi strategis pertahanan negara hingga beberapa dekade kedepan.

Dengan nasionalisme dimaksudkan bahwa *outcome* pembelajaran di Unhan adalah terbentuknya rasa nasionalisme dan cinta tanah air dengan diwujudkan dalam kesediaan berkorban apa saja demi tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara dengan sudut pandang geopolitik Wawasan Nusantara. Nasionalisme bangsa Indonesia menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila baik yang bercirikan komunisme, fasisme, fanatisme keagamaan, maupun liberalisme yang berlandaskan kebebasan dan kepentingan individual diatas kepentingan bangsa dan negara. Alumni Unhan juga mampu mewujudkan abstraksi nasionalisme kedalam tindak nyata dalam semua aspek asta gatra khususnya dalam pola dan model sistem pertahanan negara yakni Sishankamrata.

Dengan integritas dimaksudkan bahwa *outcome* pembelajaran di Unhan adalah kepribadian yang menjunjung tinggi etika dan moral Pancasila dalam setiap diri individu alumni guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pertahanan negara. Para alumni Unhan merupakan individu yang berfikir, bersikap, dan bertindak berlandaskan kepentingan pertahanan keamanan negara dan bangsa dengan mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan bangsa secara berimbang. Alumni Unhan dicetak untuk memiliki wawasan kenegarawanan dan menekan semaksimal mungkin munculnya kepentingan pribadi maupun golongan yang akan menguasai sumber daya nasional untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri.

Sejarah Unhan berawal dari salah satu program kursus di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pada tahun 2006, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, saat masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) mengeluarkan instruksi untuk menyelenggarakan Kursus Strategi Perang Semesta di Seskoad. Kursus inilah yang menjadi cikal bakal perwujudan ide untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi yang mempelajari ilmu pertahanan. Dari sejarah tersebut, terlihat bahwa Unhan telah meletakkan dasar-dasar kekhususan studinya pada Strategi Perang (Pertahanan) Semesta yang mempersiapkan seluruh wilayah nasional menjadi wilayah perlawanan terhadap setiap ancaman keamanan nasional. Kekuatan

pertahanan disiapkan dengan mengintegrasikan kekuatan militer dan kekuatan rakyat secara sinergis, serta mempersiapkan seluruh potensi nasional menjadi potensi pertahanan keamanan nasional.

Unhan senantiasa berupaya merevitalisasi konsep perang/pertahanan semesta dengan tetap berpegang kepada hukum dan konvensi internasional tentang hukum perang dan hak azazi manusia, sehingga kekeliruan masyarakat umum bahwa Sishankamrata dalam doktrin perang/pertahanan semesta memaksa rakyat sipil untuk berperang secara tradisional dan menggunakan senjata konvensional ke mandala operasi bisa diluruskan. Rakyat sipil boleh tapi tidak terbatas pada perang konvensional dalam mengejawantahkan konsep bela negara dan pertahanan negara. Membela negara lebih menekankan penyatuan jiwa dan semangat kebangsaan bagi seluruh lapisan sosial masyarakat baik pada masa damai maupun di masa darurat perang. Kemampuan profesional anak bangsa di segala bidang ilmu pengetahuan merupakan potensi pertahanan negara yang harus disinergikan demi kepentingan mempertahankan keamanan dan mencapai kesejahteraan bangsa.

Tentara Rakyat dan Tentara Pejuang: Antara Doktrin dan Hukum

Reformasi 1998, telah membawa angin perubahan kepada bangsa Indonesia. Perubahan dari era kontrol subjektif sipil dalam sistem pemerintahan kearah kontrol obyektif sipil dimana militer menjadi subordinat dari kekuasaan sipil. Angin perubahan tersebut terus bertiup kencang hingga mendorong militer masuk kedalam barak sehingga tidak bisa keluar walaupun situasi rakyat, bangsa dan negara dalam kondisi tidak menentu sampai ada keputusan politik (sipil) negara. Kondisi dan persepsi teori kontrol objektif sipil demikian yang menciptakan ketegangan psikologis antara unsur sipil (yang direpresentasikan oleh Polri dan sebagian anggota parlemen, serta aktivis hak azazi manusia) dengan unsur militer. Unsur sipil berpegang pada aturan hukum perundang-undangan sementara militer disamping berpegang kepada konstitusi negara UUD 1945, juga berpegang pada doktrin pertahanan negara yakni pertahanan rakyat semesta (pemberdayaan wilayah pertahanan atau pembinaan teritorial, komponen cadangan, dan komponen pendukung).

Melalui pembelajaran di Unhan, *civitas* akademika Unhan senantiasa berupaya mensosialisasikan bahwa landasan perjuangan TNI sebagai komponen utama pertahanan militer, dalam bertindak tidak saja berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber: Foto twiter perpusnas

Sesuai amanah konstitusi negara 1945 sebagai sumber hukum dari aturan perundang-undangan, maka TNI memiliki tanggungjawab menegakkan kedaulatan negara ketika kedaulatan negara terancam. Namun dalam prakteknya, ancaman terhadap kedaulatan negara diatasi oleh aparat kepolisian, dan walaupun ada unsur TNI statusnya justru sebagai kekuatan perbantuan dimana seharusnya TNI menjadi kekuatan utama. Dalam kasus tersebut, nampak jelas bahwa implementasi hukum belum taat azas yakni azas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Disisi lain, dalam sejarah merebut dan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945, kelompok nasionalis bersenjata yang berasal dari tentara KNIL dan Peta serta laskar-laskar rakyat dan pemuda sebagai cikal bakal TNI bersatu (gotong royong/manunggal) dengan seluruh lapisan masyarakat untuk melawan penjajah dan pengacau keamanan negara. Saat itu belum ada UU pertahanan Negara, maupun UU TNI yang mengikat dan mengharuskan setiap warga

negara mengangkat senjata. Namun sungguh menakjubkan bahwa kemanunggalan tersebut berhasil mempertahankan kedaulatan negara dan mengusir penjajah serta menghancurkan pemberontakan bersenjata. Peristiwa-peristiwa heroik pada perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan ternyata digerakkan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dikemudian hari dikenal dengan doktrin pertahanan negara atau doktrin perang semesta.

Hukum dan doktrin, keduanya sama-sama menuntut ketaatan namun berbeda sifatnya. Bila ketaatan terhadap hukum bisa disebabkan karena adanya sifat memaksa, tapi ketaatan terhadap doktrin karena adanya kesadaran bathin. Jadi ketaatan terhadap hukum dipengaruhi faktor eksternal, tapi ketaatan terhadap doktrin dipengaruhi oleh faktor internal. Oleh sebab itu maka filosofi integritas Unhan benar-benar bersumber dari nilai-nilai etika dan moral Pancasila yang digali dari nilai-nilai sosio kultural rakyat di bumi nusantara.

Bila tugas penegakan kedaulatan negara adalah amanat konstitusi yang diperkuat oleh doktrin maka TNI memiliki landasan konstitusional dan doktriner yang kuat untuk bertindak melaksanakan operasi penegakan kedaulatan. Selain itu, baik konstitusi 1945 maupun doktrin, keduanya merupakan sumber hukum dari setiap penyusunan aturan hukum pada strata dibawahnya (UU, PP, Perpres dsb). Dengan demikian, bila penyusunan produk hukum berupa undang-undang betul-betul taat azas (*Azas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yakni hukum yang lebih tinggi mengatur hukum yang lebih rendah, dalam hal ini UUD 1945 dan doktrin Pertahanan berkedudukan sebagai sumber hukum, maka keduanya berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang) maka klausul dalam UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan UU Polri yang menempatkan tugas mengatasi separatisme dan terorisme bagi TNI sebagai tugas perbantuan perlu dikaji kembali.

Universitas Pertahanan (Unhan) dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa baik

militer, PNS, maupun masyarakat umum, untuk melakukan kajian baik secara kelompok maupun individu terhadap berbagai isu yang terkait dengan aspek pertahanan keamanan negara. Untuk mahasiswa yang berstatus PNS Unhan mengharapkan bahwa lulusannya kelak dapat menjadi jembatan penghubung antara konsep pertahanan negara dengan tugas pokok lembaga tempat mahasiswa berasal. Hal tersebut memiliki nilai strategis dalam membangun sinergitas antar komponen bangsa terkait kepentingan pertahanan keamanan negara dan kesejahteraan bangsa.

Kesimpulan

Upaya Unhan dalam mempersiapkan SDM pertahanan yang mampu mempresentasikan kekuatan *Hard Power* dan *Soft Power* menjadi *Smart Power* terlihat dari upaya penyiapan pembentukan fakultas strategi pertahanan khususnya program studi perang semesta dan fakultas teknologi pertahanan. Dalam pembelajaran mata kuliah sistem pertahanan negara yakni Sishankamrata terdapat

topik tentang Sissos dan Sistek dan kombinasi dari keduanya merupakan strategi pertahanan yang sempurna (*Smart Power*).

Dalam rangka membangun kemitraan strategisnya Unhan telah melakukan kerjasama MoU dengan berbagai lembaga pemerintah seperti LAPAN, BNPB, Pemda termasuk kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Kemitraan tersebut dimaksudkan agar ilmu pertahanan bisa dilihat sebagai multi disipliner yang diwujudkan dengan menerima lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu.

Pada dasarnya Program Studi yang ada di Unhan dipersiapkan dalam rangka membangun kapasitas SDM lulusan agar memiliki wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Penguasaan teknologi persenjataan yang canggih tanpa dilandasi semangat belanegara



dan patriotisme tinggi maka sistem pertahanan keamanan negara tidak akan mampu mengatasi berbagai bentuk ancaman keamanan nasional. Memadukan pemikiran tentang kepentingan pertahanan dan kepentingan kesejahteraan melalui proses pembelajaran dalam komposisi mahasiswa militer dengan sipil umum dan pegawai negeri sipil merupakan tantangan peran Universitas Pertahanan yang sangat strategis.***



Sumber: Biro Humas Kemhan

MEWUJUDKAN INDUSTRI PERTAHANAN YANG KUAT, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEKUATAN POKOK MINIMUM (MEF) TNI

Oleh:

Laksma TNI Sri Yanto, S.T.

Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun Industri Pertahanan (Indhan) yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Ditjen Potan Kemhan) memiliki peran penting dalam menyiapkan segenap potensi industri untuk diarahkan dan dipersiapkan menjadi bagian dari kemampuan pertahanan, termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara mandiri. Sebagai Unit Organisasi Kemhan yang mempunyai tugas dalam pembinaan Industri Pertahanan, Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan memiliki 6 program yaitu:

1. Perizinan Indhan dan Badan Usaha Bahan Peledak;
2. Implementasi Kebijakan Kandungan Lokal dan Ofset;
3. Peningkatan Kerjasama Internasional;
4. Promosi Industri Pertahanan;
5. Tujuh Program Prioritas Nasional;

6. Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan).

Perizinan Indhan dan Badan Usaha Bahan Peledak

Data menunjukkan bahwa Industri Pertahanan mengalami perkembangan pesat dalam dengan berbagai kompetensi dan produk alpalhankam. Sampai tahun 2019 ini, Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 110 Industri Pertahanan, baik BUMN maupun BUMS, dengan rincian sebagai berikut :

1. Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebanyak 9 perusahaan, yaitu PT. Pindad (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Len Industri, PT. Dahana, PT Dok Kodja Bahari (PT DKB), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI), PT Garuda *Maintenance Facility* (GMF), dan PT. Merpati *Maintenance Facility* (PT. MMF). Dari 9 Indhan BUMN, 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan sebagai *Lead Integrator* (Pemadu Moda) untuk Alutsista sesuai matra yaitu : PT. PAL untuk Alutsista Matra Laut, PT. DI untuk Alutsista Matra Udara dan PT. Pindad untuk Alutsista Matra Darat.

2. Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sebanyak 101 perusahaan dengan berbagai macam kompetensi dan berperan sebagai Indhan pada tier 2 hingga tier 4.

Selain Indhan, Kementerian Pertahanan RI juga memberikan perizinan dan memantau Badan Usaha (BU) Bahan Peledak (handak). Saat ini terdaftar 12 BU handak dengan berbagai usaha yaitu:

- Produksi, terdiri dari: PT. Dahana (Handak Ansol dan asesorisnya), PT. Pindad (*Booster*), PT. MNK (Amonium Nitrat dan Detonator Non Elektrik), dan PT. KNI (Amonium Nitrat).
- Pengadaan Non Produksi, Pergudangan, Pendistribusian dan Jasa Peledakan terdiri dari: PT. Armindo Prima, PT. Trifita Perkasa, PT. Asa Karya Multipratama, PT. Aneka Gas Industri (produksi Nitrogen untuk kebutuhan medis), PT. Tri Daya Esta dan PT. Mexis.
- BU Handak yang mendapatkan izin untuk pendistribusian dan pengadaan handak melalui produsen lokal adalah PT. Distribusi Ammo Nusantara dan PT. Prima Mega Blast.

Penekanan utama dalam perizinan BU handak adalah mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan menurunkan impor dalam 3 tahun ke depan. Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan berupaya memberdayakan handak produk lokal, khususnya guna memenuhi kebutuhan industri pertambangan dan migas. Dari data tahun 2015-2018, terlihat bahwa realisasi produksi dalam negeri untuk handak Amonium Nitrat dan asesoris (*Booster, Cartridge Explosive* dan Detonator Non Elektrik) menunjukkan kecenderungan peningkatan, sementara realisasi impor terus menurun secara bertahap.

partisipasi Indhan dalam bentuk Kandungan Lokal dan *Ofset* (KLO) maupun transfer teknologi (ToT), yang merupakan mata rantai penting untuk membangun kemampuan Industri Pertahanan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Diharapkan adanya program-program tersebut, Industri Pertahanan dapat berkembang secara mandiri dan menjadi bagian penting dari mata rantai pasok (*global supply chain*) Alpalhankam.

Aturan pelaksanaan dari UU 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang berkaitan dengan *Ofset* juga telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)

dan *Ofset* (KLO) pada pengadaan alpalhankam dari luar negeri.

Dalam implementasinya, KLO telah diberlakukan untuk pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui anggaran Pinjaman dari Luar Negeri (PLN) pada Renstra periode 2016-2019. Proposal KLO dari 28 program pengadaan Alpalhankam dari luar negeri yang dialokasikan baik untuk Mabes TNI maupun Angkatan, telah diselesaikan pembahasannya dan komitmen KLO tersebut dituangkan sebagai bagian dari kontrak utama pengadaan.



Sumber: Penulis

Menhan RI Ryamizard Ryacudu menerima Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI pada tanggal 10 Desember 2018 di Auditorium TVRI, Jakarta terkait Perizinan Indhan dan Badan Usaha Bahan Peledak. (Sumber : Penulis)

Implementasi Kebijakan Kandungan Lokal dan *Ofset* (KLO)

Pasal 43 ayat (3) UU 16 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa setiap pembelian Alpalhankam dari luar negeri harus melibatkan

Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri. Sebagai bentuk penjabaran yang lebih teknis lagi, juga telah diterbitkan Permenhan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Mekanisme Imbal dagang, Kandungan Lokal

Peningkatan Kerjasama Internasional

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan, maka dilaksanakan kerja sama regional, bilateral,

maupun multilateral sesuai dengan amanat UU 16 Tahun 2012 Pasal 48. Kerja sama ini memiliki tujuan dalam hal percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan, meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, litbang, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan. Kerja sama dilakukan antar negara yang kemudian diimplementasikan oleh industri pertahanan, maupun kerjasama langsung antar industri pertahanan. Tujuan dari kerja sama ini untuk percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Kerja sama yang ada meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan. Beberapa kerja sama yang sudah berjalan dan dilaksanakan secara resiprokal pada tahun 2015 - 2019 tiap tahun adalah:

1. RI – Rusia. (*Military Technology Cooperation Meeting*)
2. RI – China. (*Defence Industry Cooperation Meeting*)

3. RI – Turki. (*Defence Industry Cooperation Meeting*)
4. RI - Korea. (*Defence Industry Cooperation Commiittee*)

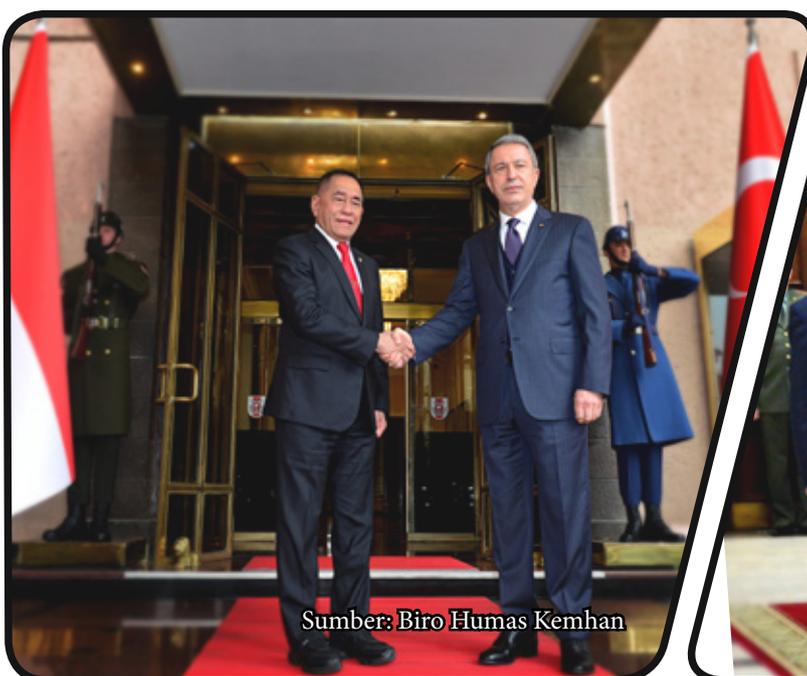
Promosi Industri Pertahanan

Saat ini Industri Pertahanan Indonesia telah mampu membuat beberapa Alpalhankam, diantaranya adalah Anoa dari PT. Pindad, CN-235 dan NC212 dari PT. DI, Kapal Patroli Cepat 28 m, Kapal KCR 60 m, Kapal Perusak kawal Rudal (PKR), Kapal *Landing Platform Dock (LPD)* dari PT. PAL, dsb. Untuk mengenalkan produk-produk tersebut, dilaksanakan promosi melalui pameran baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa pameran yang diikuti pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pameran Industri Pertahanan di Luar Negeri
 - a. *Defense Service Asia (DSA)*, Malaysia.
 - b. *Langkawi International Maritime And Aerospace Exhibition (LIMA)*, Malaysia.

- c. *Asian Defence, Security & Crisis Management Exhibition & Conference (ADAS)*, Filipina.
- d. *Asian Defense & Security Exhibition*, Thailand.
- e. *International Defence Industry Fair (IDEF)*, Turki.
- f. *International Defence Exhibition And Conference (IDEX)*, Abu Dhabi.
- g. *Feria Aeroespacial Mexico (FAMEX)*, Mexico.
- h. *International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX)*, Korea.

2. Pameran Industri Pertahanan Dalam Negeri.
 - a. *Indo Defence*
 - b. Hari Nusantara di NTT
 - c. Pameran Alutsista Industri Pertahanan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI Ke-72.

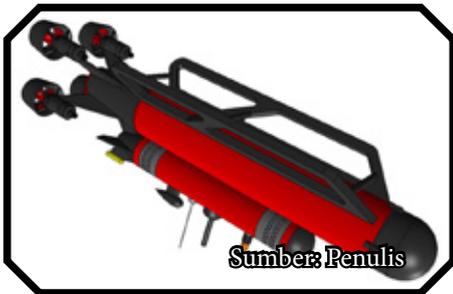


Sumber: Biro Humas Kemhan



Sumber: Biro Humas Kemhan

9. *FA Mini Mobile Target Torpedo*. Usulan dari TNI AL yang dikembangkan oleh Dislitbangal dan diproduksi oleh PT. Robo Marine pada tahun 2016 sebagai target torpedo. Produk ini telah tersertifikasi oleh Puslaik Kemhan.



10. *FA Remote Control Weapon System*. Produksi PT. Respati dengan *end user* TNI AD yang digunakan untuk mempermudah penembakan dengan bantuan peningkatan stabilitas lewat program *target tracking/locking* dan komputer balistik.



11. *FA Air Combat Maneuvering Instrument (ACMI)*. Usulan dari TNI AU untuk dipakai pada pesawat Sukhoi dan diproduksi oleh PT TRESS. ACMI ini telah memperoleh Sertifikat Tipe dari Puslaik Kemhan dan telah dipakai pada Latihan Angkasa Yuda TNI AU pada tanggal 17 Juli 2019 dengan hasil sangat baik.

Capaian Tujuh Program Prioritas Nasional

1. Program Pengembangan Radar Nasional

Melalui pengadaan Radar Pasif pihak penyedia ERA dari Republik Ceko memberikan Alih Teknologi terkait pemeliharaan Radar Pasif sampai Depo Level, kemampuan untuk mengembangkan Library, kemampuan untuk Integrasi Data Radar Pasif dengan Radar Aktif dan Sistem Pertahanan, kemampuan untuk mengkonfigurasi, memanfaatkan dan modifikasi *Mission Planning Software* dengan penerima Ofset pada pengadaan ini adalah PT. Len, PT. INTI dan PT. CMI. Selain itu Balitbang Kemhan juga telah mengembangkan Radar Pasif dan telah menghasilkan satu prototipe bersama PT. LAPI, ITB yang terdiri dari satu kendaraan *Master Station* dan tiga *Remote Station* yang beroperasi pada spektrum *VHF/UHF*.

2. Program Pengembangan Rudal Nasional

Telah dilaksanakan pembuatan *seeker* secara mandiri pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *Inertial Navigation System (INS)* di tahun 2018 dan dilanjutkan dengan *Reverse Engineering System Rudal* yang dibagi dalam tiga tahap yaitu pada tahun. 2019, 2020, dan 2021 dengan capaian nantinya Indhan Konsorsium Rudal mampu memproduksi secara mandiri rudal yang tersertifikasi.

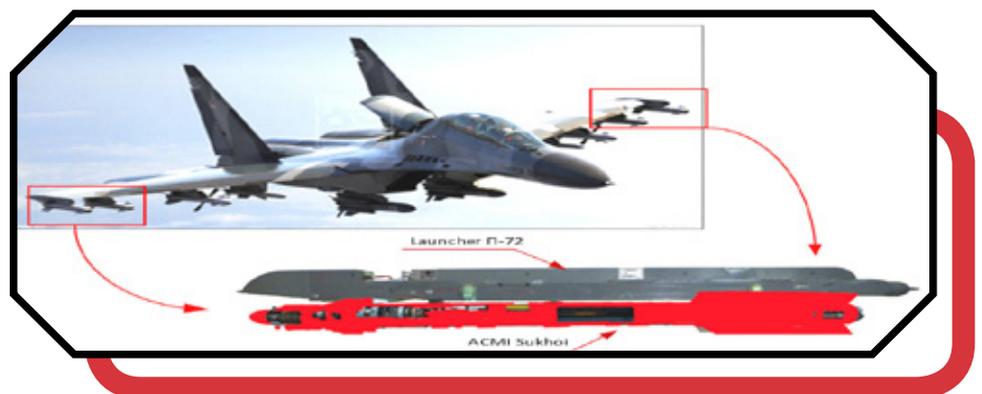
3. Pembangunan Industri Propelan

Diawali dengan pelaksanaan *Ground Breaking* oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Perindustrian pada tahun 2012. Selanjutnya Balitbang Kemhan RI Kemhan selama 2015-2019 telah membangun Fasilitas *Nitrogliserin, Laboratorium, Acid Plant, Water Treatment Plant, Power Plant 10,3 MWatt* dan Gedung Layanan Umum. Juga telah dilaksanakan verifikasi kepada 6 (enam) penyedia teknologi yang memberikan *Transfer Know How* dan *Technical Assistance* dalam pembuatan *Spherical Propellant*.

4. Jet Tempur KF-X/IF-X

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 2011 dengan tiga tahapan:

1. Tahap *Technology Development (TD Phase)*
2. Tahap *Engineering and Manufacturing Development (EMD Phase)*
3. Tahap *Production*



Air Combat Maneuvering Instrument Sumber: Penulis

Pelaksana kegiatan adalah Balitbang Kemhan RI dan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Indhan pelaksana dan PT.KAI (*Korea Aerospace Industry*) sebagai mitra kerja. Tahap EMD saat ini telah masuk pada *Critical Design* dan sejauh ini telah dikirimkan 84 orang *engineer* ke Korea Selatan. Presiden RI memerintahkan dalam sidang Kabinet tahun 2018 untuk renegotiasi program *Joint Development* Pesawat Tempur KF-X/IF-X antara pihak RI dan Korsel.

5. Kapal Selam

Program pembangunan Kapal Selam merupakan realisasi dari kontrak 3 Kapal Selam dari *DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering)* Korea. Di dalam kontrak, disertakan pelatihan personel pada saat pembangunan Kapal Selam ke-1 dan ke-2 di Korea Selatan. Ditjen Pothan Kemhan RI memberikan pendampingan jasa konsultan *ToT* dari *Daewoo Logistic Corp (DWL)*.



Sumber: Biro Humas Kemhan

Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi Kapal Selam di PT PAL diperoleh melalui skema PMN (Penyertaan Modal Negara). Pada tahun 2017, Kapal Selam pertama selesai dan diberi nama KRI 403 – *Nagapasa*. Selanjutnya, pada tahun 2018, kapal selam kedua selesai dan diberi nama KRI-404 *Ardadedali*. Tahun 2019 Kapal Selam ketiga diberi nama KRI-405 *Alugoro* dan saat ini dalam tahap pengujian. Ketiga Kapal Selam saat ini telah memperkuat TNI AL. Program Kapal Selam saat ini dilanjutkan ke tahap pengadaan Kapal Selam *batch-2* (Kapal Selam ke-4, ke-5 dan ke-6), PT. PAL sebagai kontraktor utama dengan menggandeng *DSME*, Korea.



Upacara penamaan KRI 405-Alugoro pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Dermaga Fasilitas Kapal Selam, PT PAL, Surabaya.

Sumber: Biro Humas Kemhan

6. Roket Nasional

Program Roket Nasional dimulai dari Program Roket RX-1210 yang dinamakan RHan-122A oleh Balitbang Kemhan RI pada tahun 2010, dengan hasil memuaskan dimana lintasan lurus dan jatuhnya mengumpul

pada titik sasaran. Pada Tahun 2013 selanjutnya dilakukan penyempurnaan desain menjadi RHan-122B. Tahun 2017 telah dilaksanakan pembuatan roket sebanyak 77 unit untuk penyusunan tabel tembak yang dilaksanakan oleh Konsorsium Roket yang terdiri dari PT. Pindad, PT. DI, PT. Dahana dan Lapan. Tahun 2018 diproduksi 120 unit roket untuk melengkapi penyusunan Tabel Tembak dan Sertifikasi. Produk telah melewati serangkaian uji statis dan uji dinamis yang dilaksanakan di Pameungpeuk Garut, Lumajang dan Cibenda.

Penutup

Ditjen Pothan Kemhan RI selama periode 2015-2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kesiapan potensi pertahanan nirmiliter sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta yaitu pembinaan Industri Pertahanan melalui Kandungan Lokal, *Ofset* dan Transfer Teknologi pada setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri, serta penugasan pembuatan *First Article*. Selain itu, kerjasama Industri Pertahanan dengan negara-negara sahabat terus dibina, diikuti dengan upaya promosi ke luar negeri dan dalam negeri melalui pameran produk pertahanan. *Indo Defence* telah menjadi ajang pameran pertahanan yang besar dan membanggakan. Tiga dari tujuh Program Prioritas Nasional telah mencapai hasil yang mengembirakan yaitu *Medium Tank* Harimau, Kapal Selam dan Roket RHan-122B. Itu semua telah menunjukkan hasil bahwa Indonesia dapat muncul sebagai negara produsen alutsista yang diperhitungkan di kawasan dengan mewujudkan Industri Pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan kekuatan pokok minimum (*MEF*) TNI. ***

KIPRAH TNI SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PERTAHANAN NEGARA DI KANCAH DUNIA INTERNASIONAL



Sumber: Biro Humas Kemhan

Oleh:
Brigjen TNI Bonifasius Widiyanto. S, SH., MH
Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan

Pendahuluan

DTNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan juga dalam menjaga perdamaian serta keamanan dalam arti yang luas, adalah mengerti dengan jelas makna tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah serta melindungi bangsa dan tumpah darah. Hal ini juga dapat dipahami bahwa TNI mengemban amanat mengamankan kepentingan politik negara.

Di sisi lain tuntutan sebagai prajurit profesional untuk mengembangkan intelektualisasi

yakni dengan menggali nilai-nilai baru bagi pengembangan kemampuan militer khususnya dan juga sesuai kebutuhan bangsa Indonesia terkini dan mendatang. Pada dimensi lain pemerintah diberi amanat oleh Undang-Undang untuk membangun kekuatan TNI dan membiayai TNI baik kebutuhan dasar dan perawatan prajurit serta penggunaan kekuatan TNI. Dengan demikian TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dapat fokus menjalankan tugas negara.

Saat yang tepat untuk melihat ke belakang : tentang semua yang telah diperbuat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta menata

langkah menuju masa depan. Bagi TNI, apapun tugas yang menyangkut persoalan bangsa merupakan panggilan tugas pengabdian dengan tulus dan ikhlas sehingga kepercayaan rakyat kepada TNI akan semakin tinggi. Terlebih lagi, bila TNI mampu membuktikan diri dalam melaksanakan tugas negara dengan baik dan mewujudkan kepentingan masyarakat banyak yang tidak bisa dinilai oleh rupiah. Tentunya kepercayaan itu harus kita bangun dan jaga dengan baik, sebagaimana kesetiaan TNI dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terlebih, berbagai tugas yang menyangkut persoalan bangsa, merupakan tugas pengabdian

TNI dengan tetap meneguhkan komitmen untuk menjadi TNI yang kuat, hebat dan professional. Bentuk komitmen TNI tersebut diperlihatkan dengan terus memantapkan kemandirian TNI rakyat, meningkatkan semangat pengabdian, kualitas kinerja, etos kerja dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dalam mengemban setiap tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya selain penugasan di dalam negeri, TNI juga melaksanakan kegiatan di luar negeri dalam rangka menjaga nama baik Bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Pengabdian TNI Terhadap Negara Dan Bangsa Indonesia.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kita lihat mulai pengabdian terbaik TNI, sejak awal perang kemerdekaan hingga saat ini rela

mengorbankan jiwa dan raga ditandai dengan gugurnya puluhan prajurit sebagai kusuma bangsa, pada hakekatnya merupakan bukti atas komitmen kesetiaan dan pengabdian tulus prajurit TNI kepada rakyat bangsa dan Negara Indonesia tentunya merupakan kebijaksanaan pemerintah yang sah.

TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi operasi militer untuk perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Khusus dalam tugas OMSP, berbagai tugas telah dilakukan oleh prajurit TNI dengan sangat baik, bahkan melebihi panggilan tugasnya. Setiap prajurit dituntut mengedepankan tugas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sekecil apapun sikap dan tindakan primitif akan mengganggu bahkan merusak jati diri TNI, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Prestasi dan kinerja optimal TNI yang telah mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan lagi.

Implementasinya, prajurit TNI harus selalu menjadi suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimanapun prajurit TNI berada dan bertugas.

TNI juga berkomitmen dan berupaya untuk terus mengingatkan bahwa seluruh komponen bangsa dan setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama dalam pembelaan negara. Hanya lewat kebersamaan antara TNI dan segenap komponen bangsa yang merupakan kemandiriannya bersama rakyat, adalah kunci kekuatan yang strategis dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan negara. Komitmen dan tanggung jawab TNI terhadap negara tidak pernah surut karena nilai dan semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menjiwai dan terpatritri dalam diri setiap prajurit TNI.

Tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai alat Negara di bidang pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, TNI berkomitmen untuk membantu



Sumber: Biro Humas Kemhan

tugas pemerintah (pusat dan daerah). Disamping itu TNI juga ikut memberdayakan dan membantu kesulitan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai program pembinaan teritorial dan serbuan teritorial, seperti program TMMD, membantu mewujudkan ketahanan pangan, pengobatan massal, KB Manunggal Kesehatan, TNI Manunggal Buta Aksara, dan berbagai peran lainnya seperti keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme/ radikalisme, partisipasi dalam misi perdamaian dunia, bencana alam, kebakaran hutan, pengamanan obyek vital nasional, penghijauan dan lain sebagainya. Kita juga patut berbangga dengan berbagai keberhasilan yang diraih TNI, seperti hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI), yang menempatkan TNI sebagai lembaga Negara dengan tingkat kepercayaan yang paling tinggi dan mampu menunjukkan kinerja yang baik, kemudian hasil survey Lembaga Analisis Militer

Global Fire Power (GFP) 2019 yang menempatkan TNI dalam peringkat ke-15 kekuatan militer dunia.

Perspektif Kebijakan Diplomasi dan Kerjasama Bidang Pertahanan Dalam Mendukung Peran TNI di Forum Regional ataupun Internasional.

Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Kekurangoptimalan soal diplomasi ini, mengakibatkan komponen pertahanannya belum lengkap dan unsur utamanya kurang memiliki komitmen. Pembangunan pertahanan yang cakupannya banyak akan beresiko untuk mewujudkan efek pengantar yang disegani dalam mendukung posisi tawar di ajang diplomasi. Tanpa mengabaikan peran diplomasi pertahanan

nirmiliter dalam konteks pertahanan integratif dan/atau diplomasi total. Diplomasi pertahanan militer yang diperankan TNI/komponen utama atau militer merupakan bagian dari diplomasi pertahanan, khususnya jika terkait dengan sasaran strategis hubungan bilateral, kerja sama multilateral, penugasan TNI dalam misi perdamaian dunia dan/atau kemanusiaan. Untuk mendukung hal itu, diplomasi militer dalam konteks pertahanan merupakan salah satu bagian kekuatan negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Bahkan, dengan diplomasi militer dijadikan alat negara di bidang pertahanan tanpa dukungan komponen cadangan dan komponen pendukung, terus melakukan penyesuaian manajemen hubungan internasionalnya guna menjawab tuntutan nasional/ reformasi dan tantangan global.

Diplomasi dapat dipahami sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Terkait hal



Sumber : Biro Humas Kemhan

tersebut, dewasa ini pemerintah Indonesia menelurkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah diplomasi total. Dalam diplomasi total, semua *stakeholder* (pemangku kewenangan) diplomasi Indonesia diajak untuk berperan (selektif) aktif. Karena pada hakekatnya, diplomasi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa atau komponen utama yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung serta unsur utama yang didukung dengan unsur-unsur lain sebagai kekuatan bangsa. Diplomasi akan semakin kuat, manakala semua komponen bangsa ikut serta dalam mempromosikan Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan mempunyai konsekuensi yang harus dijalankan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut sebagaimana makna sistem pertahanan negara itu sendiri.

Dapat pula didefinisikan bahwa sebagai diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI adalah mendukung kebijakan politik luar negeri atau melaksanakan keputusan politik negara/kebijakan pertahanan serta mendukung penyelesaian berbagai permasalahan internasional.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan posisinya menjadikan pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional, melainkan juga internasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional di bidang pertahanan.

Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun kerja sama internasional dengan tetap berpedoman pada prinsip sebagai negara nonblok yang

tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya secara aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global.

Soft Power Bagian dari Diplomasi Pertahanan.

Untuk mengingat kembali, bahwa sesuai UU, politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan merupakan politik netral. Akan tetapi merupakan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Selain itu tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya. Semua ini demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya. Selain itu juga dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum politik, tanpa mengabaikan pentingnya makna bebas aktif dan perjanjian internasional serta pandangan tentang perang dan damai bagi bangsa Indonesia. Apalagi, jika terkait dengan penggunaan kekuatan TNI akibat ancaman yang multidimensional dan/atau kemungkinan terjadinya konflik yang cenderung kompleks dengan penetapan status keadaan. Diplomasi

diharapkan dapat menyelesaikan ancaman dan/atau konflik yang terjadi, Setidaknya dikenal beberapa istilah yang ada pada Diplomasi, seperti; Membangun saling percaya (*Confidence Building Measure/CBM*); Pembangunan kapasitas pertahanan; dan Kerja sama industri pertahanan.

Oleh karena itu, begitu banyak cakupannya mengenai diplomasi. Apalagi, diplomasi pertahanan Indonesia juga diorientasikan untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan Indonesia (pembangunan pertahanan yang terkait visi). Pada gilirannya keberhasilan pelaksanaan diplomasi (total) pertahanan Indonesia itu, sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia secara total/komprehensif.

Sejalan dengan itu, pilihan pelaksanaan diplomasi pertahanan sebagai makna *soft power diplomacy* yang ada dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Selain itu, pemaknaan *soft diplomacy* merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi, yakni dengan mengedepankan unsur sosial budaya/nilai intrinsik-mendasar dalam kegiatan diplomasi.

Tidak berlebihan, *platform* politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif dilakukan melalui *soft diplomacy*, seperti apa yang dilakukan para prajurit TNI sebagai *Peace Keeping Force* (pasukan siaga/perdamaian dunia-Yon mekanis) di beberapa Negara. Hal itu dilakukan berkat adanya *soft power* yang melekat dalam diri mereka. Apalagi, adanya kekhususan diplomasi yang ditopang

oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Pokok-Pokok Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan.

Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling percaya antar bangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain. Kerja sama tersebut juga bertujuan membangun kapabilitas pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, pengadaan Alutsista strategis, dan transfer teknologi bagi kemandirian sarana industri pertahanan.

Dalam konteks tersebut, kerja sama internasional bidang pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di

bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, sebagai instrumen diplomasi pertahanan maka kerja sama internasional bidang pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif, dan bermartabat.

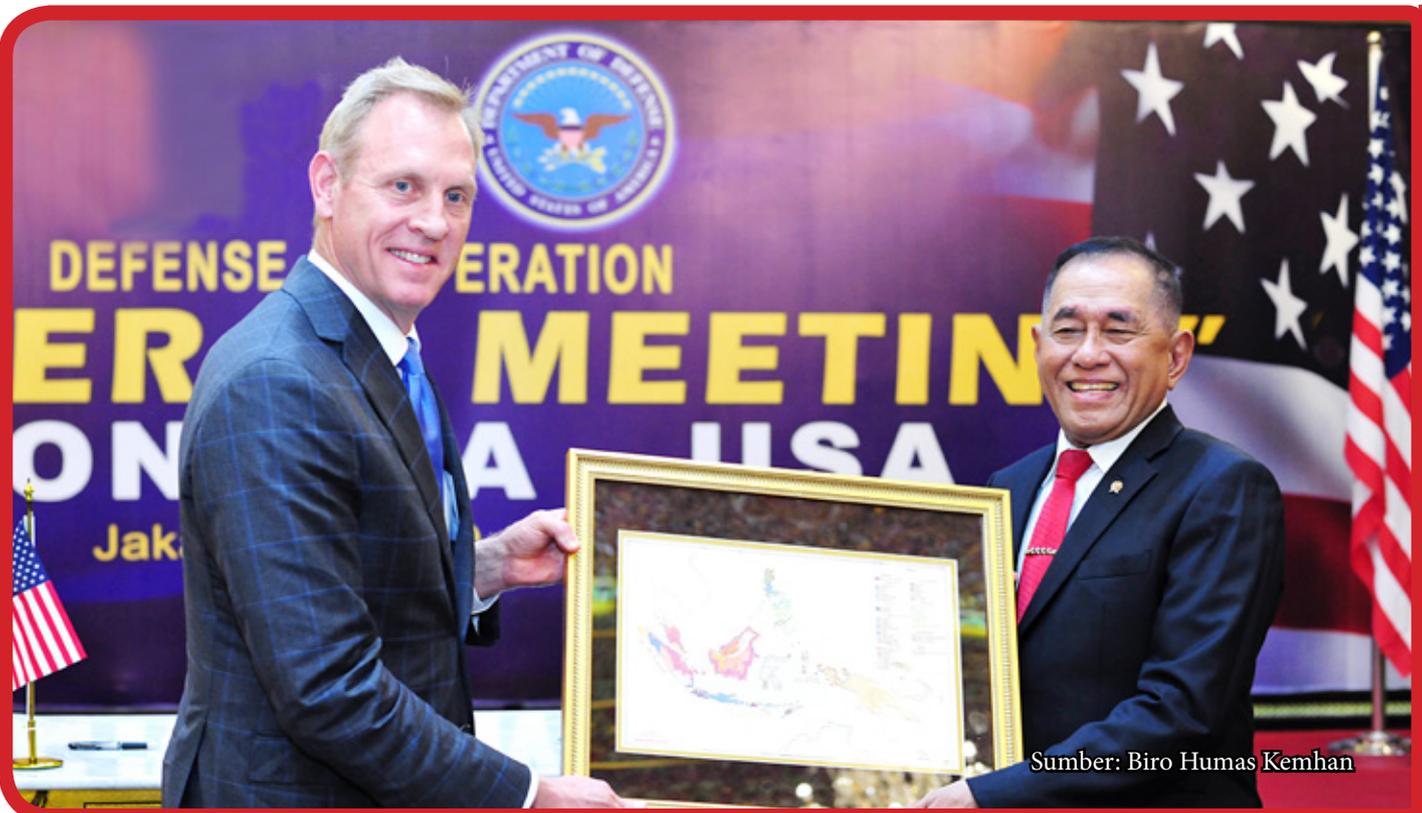
A. Kerja Sama Bilateral.

Kerja sama bilateral di bidang pertahanan dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya (*trust building*), mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua belah pihak.

Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas untuk membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia, negara-negara Pasifik, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara Afrika untuk

memperkuat dan mengembangkan hubungan dan kerja sama yang bersahabat di bidang pertahanan berdasarkan prinsip saling menghormati kemerdekaan, menghormati penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dengan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, serta kesetaraan dan hidup berdampingan sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam PBB dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

Lingkup kerja sama bilateral pertahanan meliputi: pertukaran informasi tentang masalah-masalah dan pembentukan pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan, pertukaran pejabat dalam rangka pendidikan, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan kesepakatan bersama; pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lainnya. Disamping itu, juga bekerja sama dalam peningkatan kerja sama



antar institusi dalam bidang industri dan teknologi pertahanan, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknik, pelatihan, penyediaan peralatan pertahanan, dan produksi bersama.

B. Kerja Sama Multilateral.

Kerja sama multilateral baik di kawasan maupun internasional meliputi kerja sama dalam kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional dan kerja sama dalam mendukung misi perdamaian dunia maupun kerja sama lainnya.

1) Kerja Sama Dalam Kerangka ASEAN.

Dalam melaksanakan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjunjung tinggi norma kerja sama, prinsip regionalisme, dan sentralitas ASEAN khususnya komitmen bersama untuk mencari solusi damai dalam setiap permasalahan yang timbul. Pilar *ASEAN Political and Security Community (APSC)* mendorong

lebih mengedepankan perwujudan komitmen membangun kerja sama pertahanan yang lebih nyata dan praktis sehingga menyentuh permasalahan yang dihadapi.

Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan dalam upaya menjaga kedaulatan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan terciptanya stabilitas. Melalui dialog dan konsultasi, Indonesia berupaya menjadi fasilitator dalam menangani konflik yang timbul. *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)* merupakan wadah kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara anggota ASEAN, sedangkan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* merupakan wadah kerja sama pertahanan negara anggota ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN.

Pada forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia menjadi bagian dari *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Forum ini digunakan sebagai tempat untuk

melakukan dialog dalam berbagai isu di bidang politik dan keamanan yang menjadi perhatian bersama.

Disamping itu, Indonesia juga melakukan forum dialog kerja sama bidang pertahanan dengan beberapa negara mitra dialog. Forum dimaksud antara lain: *ASEAN-US Ministers' Defence Informal Meeting*, *ASEAN-Cina Defence Ministers' Informal Meeting*, *ASEAN-Japan Defence Ministers' Informal Meeting*, *ASEAN-Japan Defence Vice-Ministerial Meeting*. Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas untuk membangun kerja sama multilateral dengan negara-negara di dunia demi terciptanya kawasan yang stabil, aman, dan damai.

2) Kerja Sama Forum-Forum Internasional.

Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam berbagai forum internasional bidang pertahanan. Disamping forum Jakarta *International Defence Dialogue (IIDD)*, yang merupakan



Sumber: Biro Humas Kemhan

upaya dan inisiasi Indonesia, bersama negara lain guna saling bertukar pandangan di bidang pertahanan. Kehadiran Indonesia dalam *Shangrila Dialogue, Tokyo Defence Forum, Xiangshan Forum, Moscow Conference*, Forum pameran pertahanan di Singapura, Malaysia dan beberapa negara lain serta forum internasional lainnya tetap dijaga agar Indonesia menjadi salah satu rujukan dalam membangun kerja sama internasional.

Indonesia juga berperan dalam penyelesaian konflik politik di Filipina seperti perjanjian damai *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* dengan mengirimkan pengamat militer yang tergabung dalam *International Monitoring Team (IMT)*. Posisi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Forum *International Committee of Military Medicine (ICMM)* menekankan adanya kemitraan, interoperabilitas, serta pertukaran pengetahuan serta ilmu kedokteran militer. Forum ini juga membuktikan peran aktif dari Indonesia dalam rangka mendukung misi kemanusiaan dibawah payung *ICMM*. Forum ini dijadikan sebagai media membangun kerja sama di bidang kesehatan dalam percaturan militer dunia.

Indonesia juga aktif mengikuti kegiatan forum internasional yang diselenggarakan oleh negara lain seperti, *Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG)*.

- 3) Kerja Sama Dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peran serta Indonesia dalam pengiriman pasukan TNI pada operasi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat Pembukaan UUD NRI 1945, dalam rangka ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Partisipasi Indonesia telah memberikan bobot yang semakin baik terhadap hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Hingga saat ini Indonesia telah berpartisipasi dalam sembilan misi perdamaian PBB dengan jumlah personel sebanyak 3074 orang (terdiri dari 2988 prajurit dan 86 wan TNI, (sumber : https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2_country_ranking_10.pdf)), yaitu misi *UNIFIL* di Lebanon, misi *MONUSCO* di Kongo, misi *MINUSCA* di Republik Afrika Tengah, misi *UNAMID* di Darfur Sudan, misi *UNISFA* di Abyei Sudan, misi *UNMIL* di Liberia, misi *MINURSO* di Maroko, misi *UNMISS* di Sudan Selatan dan misi *MINUSMA* di Mali. Pengiriman personel TNI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang diharapkan akan mencapai 4.000 orang pada tahun 2019. Sampai dengan saat ini personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian terdiri atas beberapa macam penugasan yaitu pasukan militer, pengamat militer, dan staf militer. Indonesia juga mengirim beberapa Alutsista TNI seperti kapal perang (KRI) yang tergabung dalam *Maritime Task Force (MTF)* misi *UNIFIL* Lebanon dan pengiriman pesawat Helikopter MI-17 yang bertugas di misi *MINUSMA* Mali.

Update Terbaru Kerangka Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan.

A. ASEAN Outlook Di Indo-Pasifik.

Perkembangan dinamika geopolitik dan geo-ekonomi regional dan global dalam dekade terakhir telah mendorong munculnya

berbagai konsep mengenai Indo-Pasifik oleh beberapa kekuatan dunia. Konsep-konsep tersebut meliputi *Free and Open Indo-Pacific* (Amerika Serikat); *Stable and Prosperous Indo-Pacific* (Australia), *Free and Open Indo-Pacific Strategy* dan *Asia-Africa Growth Corridor* (Jepang); *Security and Growth for All in the Region – SAGAR* dan *Act East Policy* (India); *New Southern Policy* (Korea Selatan/ ROK); *Belt and Road Initiative* (Tiongkok).

Menghadapi perkembangan tersebut, Indonesia berinisiatif menyampaikan konsep mengenai Indo-Pasifik sebagai *outlook* di *ASEAN: ASEAN Collective Concept: An Indo-Pacific Outlook* melalui pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, KTT ASEAN dan KTT Asia Timur sejak 2018 yang didasarkan pada prinsip-prinsip; *inclusiveness, promotion of cooperation, habit of dialogue*, serta *respect to international laws*. Konsep tersebut juga menekankan *ASEAN Centrality* dengan *ASEAN led mechanism* utamanya *East Asia Summit (EAS)* sebagai *platform* inklusifnya.

Pembentukan kerjasama Indo-Pasifik dalam konteks ASEAN ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan arsitektur baru di kawasan, namun lebih memanfaatkan dan mensinergikan arsitektur awasan yang sudah ada di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, termasuk diantaranya dengan mengoptimalkan *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.

Indonesia mengajukan tiga area kerjasama dalam *ASEAN Collective Concept: An Indo-Pacific Outlook*, yang meliputi; Kerjasama maritim; Konektivitas dan Infrastruktur; dan Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).

Beberapa mitra dialog dan mitra lainnya telah menunjukkan komitmen untuk mendukung dan terlibat dalam kerjasama tersebut dengan ASEAN. Sebagaimana disebutkan di dalam *Chairman's Statement* KTT ASEAN ke-33, ASEAN kemudian bekerjasama untuk menghasilkan sebuah ASEAN common concept on Indo-Pacific cooperation.

Pada ASEAN SOM Retreat on ASEAN Collective Concept: An (Indo-Pacific) Outlook, di Chiang Rai, Thailand, tanggal 8 Maret 2019, Pertemuan telah menyepakati bahwa konsep bersama ASEAN akan dinamakan "ASEAN Indo-Pacific Outlook" dan juga telah berhasil memfinalisasi paper mengenai outlook dimaksud untuk dirujuk ke tingkat para Menlu ASEAN guna pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut. ASEAN Outlook ini disahkan pada KTT ke-34 ASEAN bulan Juni 2019. Indonesia mendukung terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang berprinsip pada keterbukaan,

transparansi, inklusifitas, sentralitas ASEAN dan respek terhadap hukum internasional.

Pada tingkat ASEAN, terdapat kesamaan pandangan bahwa persaingan antar negara besar di kawasan harus diwaspadai karena dapat membawa dampak besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan. ASEAN juga melihat pentingnya ASEAN-led mechanisms sebagai platform ASEAN untuk berdialog dengan negara-negara besar.

Dari pelaksanaan High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2019, terdapat kecenderungan yang mengarah pada konvergensi kepentingan negara-negara di kawasan, terutama di antara anggota EAS.

Meski memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal, seperti cakupan geografis kawasan Indo-

Pasifik, negara-negara di kawasan menunjukkan dukungan terhadap prinsip kerjasama yang inklusif (*inclusiveness*), terbuka (*openness*), dan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional (*respect to international laws*) di Indo-Pasifik. Negara-negara di kawasan juga mendukung peran sentral ASEAN dalam kerjasama di Indo-Pasifik.

Negara-negara di kawasan juga percaya bahwa peningkatan konektivitas melalui sebuah Indo-Pacific Connectivity Outlook yang mensinergikan berbagai konsep konektivitas yang telah ada (*connecting the connectivities*) dapat menjadi fasilitator dalam menjaga stabilitas sekaligus akselerator pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik.

ASEAN Outlook pada Indo-Pasifik yang mempertimbangkan ASEAN sentralitas sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerjasama



Sumber: Biro Humas Kemhan

di wilayah Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin *ASEAN*, seperti KTT Asia Timur (*EAS*), sebagai *platform* untuk dialog dan pelaksanaan Kerjasama Indo-Pasifik, sambil mempertahankan format mereka. Lebih jauh lagi, *ASEAN* juga dapat berusaha untuk mengembangkan, jika diperlukan, kerjasama dengan mekanisme regional dan sub-regional lainnya di wilayah Asia-Pasifik dan Samudera Hindia pada bidang tertentu dari kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif yang relevan.

Konsisten dengan puluhan tahun peran *ASEAN* dalam mengembangkan dan membentuk arsitektur regional di Asia Tenggara dan sekitarnya, dan dengan norma dan prinsip *ASEAN* sebagaimana terkandung dalam Piagam *ASEAN* dan dokumen *ASEAN* lainnya yang relevan, *ASEAN Outlook* di Indo Pasifik oleh *ASEAN* terdiri dari unsur kunci berikut ini :

- a. Sebuah perspektif untuk melihat wilayah Asia-Pasifik dan Samudera Hindia, bukan sebagai daerah yang bersebelahan tetapi sebagai wilayah yang saling berhubungan erat, dengan *ASEAN* memainkan peran sentral dan strategis;
- b. Wilayah Indo-Pasifik dalam dialog dan kerjasama, bukan persaingan;
- c. Wilayah pengembangan dan kemakmuran Indo-Pasifik untuk semua;
- d. Pentingnya domain maritim dan perspektif dalam arsitektur regional yang berkembang.

ASEAN Outlook di Indo-Pasifik harus mendukung dan memberikan ballast untuk dinamisme saat

ini di wilayah Indo-Pasifik, yang harus dilihat dari perspektif, untuk mendorong kemajuan. Dengan demikian, juga harus memberikan nilai tambah untuk pengaturan regional yang ada. Oleh karena itu, kata *ASEAN Outlook* di Indo-Pasifik ditujukan untuk :

- a. Menawarkan pandangan untuk memandu kerjasama di wilayah tersebut;
- b. Membantu mempromosikan lingkungan yang memungkinkan untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di daerah dalam mengatasi tantangan bersama, menjunjung tinggi arsitektur Regional berbasis aturan, dan mempromosikan kerjasama ekonomi yang lebih dekat, dan dengan demikian memperkuat kepercayaan diri dan kepercayaan.
- c. Meningkatkan proses pembangunan masyarakat *ASEAN* dan lebih memperkuat mekanisme yang dipimpin oleh *ASEAN*, seperti *EAS*; dan
- d. Menerapkan dan menajaki bidang kerjasama prioritas *ASEAN* lainnya, termasuk kerjasama Maritim, konektivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan bidang kerjasama ekonomi dan lainnya yang mungkin.

ASEAN Outlook di Indo-Pasifik melibatkan penguatan lebih lanjut dan optimalisasi mekanisme yang dipimpin *ASEAN*, termasuk KTT Asia Timur (*EAS*), *ASEAN Regional Forum (ARF)*, pertemuan Menteri Pertahanan *ASEAN Plus (ADMM-Plus)*, diperluas *ASEAN Forum Maritim (EAMF)* dan lain-lain seperti mekanisme *ASEAN Plus One* yang relevan. *ASEAN Outlook*

di Indo-Pasifik dimaksudkan untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran.

ASEAN Outlook di Indo-Pasifik didasarkan pada prinsip penguatan *ASEAN* sentralitas, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, kerangka kerja berbasis aturan, tata pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, saling melengkapi dengan kerangka kerjasama, kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, saling menguntungkan dan menghormati hukum internasional, seperti Piagam PBB, Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut, dan perjanjian PBB lainnya yang relevan dan Konvensi, Piagam *ASEAN* dan berbagai *ASEAN* Perjanjian dan prinsip untuk hubungan yang saling menguntungkan (2011).

Mengakui pentingnya relevansi dan kontribusi positif dari perjanjian *Amity* dan kerjasama di Asia Tenggara (*TAC*) untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di daerah selama lebih dari 40 tahun. *ASEAN Outlook* di Indo-Pasifik akan dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam *TAC*, yang antara lain meliputi, penyelesaian damai sengketa, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan dan promosi aturan hukum, dengan maksud untuk mempromosikan lebih lanjut *Amity* dan kerjasama antara negara di Indo Pasifik.

ASEAN Outlook di Indo-Pasifik pada saat yang sama akan membantu untuk menghasilkan momentum untuk membangun kepercayaan strategis dan kerjasama di wilayah tersebut. Lebih jauhnya akan diperkuat oleh *ASEAN* dalam menegaskan kembali tujuan dan prinsip dari *TAC* dan mempromosikan

penerapannya dalam melakukan hubungan antar negara di wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas, termasuk melalui dokumen *ASEAN* yang sesuai.

Posisi Indonesia dalam *Indo Pacific Outlook*.

- Menggarisbawahi pentingnya kerjasama Indo-Pasifik yang merupakan inisiatif Indonesia untuk memperkuat sentralitas dan kesatuan *ASEAN*.
- Menjelaskan bahwa *Indo-Pacific Outlook* yang didorong Indonesia di tingkat *ASEAN* ditujukan untuk meningkatkan kerjasama, bukan rivalitas, dan mengedepankan prinsip-prinsip: keterbukaan, transparansi, inklusivitas dan penghormatan terhadap hukum internasional.
- Menyampaikan bahwa *Indo-Pacific Outlook* tidak dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme baru di kawasan, melainkan

penguatan mekanisme yang sudah ada guna meningkatkan kerjasama dengan *ASEAN* sebagai penggerak utamanya.

B. Kerjasama *ASEAN Our Eyes (AOE)*.

Indonesia telah menginisiasi kerjasama *Our Eyes Initiative (OEI)* dalam pertemuan *ADMM* di Clark, Pampanga Filipina pada tanggal 23 Oktober 2017. Tujuan dari *OEI* dalam rangka merespon perkembangan terorisme yang telah bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. *Our Eyes Initiative* merupakan wadah pertukaran informasi strategis terkait dengan terorisme dan radikalisme bagi ke-6 negara (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand) yang terdampak di Kawasan Asia Tenggara. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kerjasama *Our Eyes Initiative* berkembang tidak hanya di bidang terorisme saja tetapi meningkat ke

bidang kerjasama keamanan lainnya.

Pada awal mula pembentukan *OEI* hanya melibatkan 6 dari 10 negara *ASEAN* saja, hal ini sebagai langkah awal dalam memerangi terorisme di Kawasan. Setiap negara menyadari bahwa dibutuhkan kerjasama yang sinergis di Kawasan. Kerjasama *OEI* akan difokuskan pada 3 prioritas utama yaitu; (i) mengawasi aliran uang untuk pendanaan terorisme, (ii) mengawasi kembalinya *Foreign Terrorist Fighters* termasuk yang terafiliasi dengan *ISIS*, (iii) mengawasi sosmed dan *platform* lainnya yang memfasilitasi propaganda teroris.

Soft Launching Our Eyes Initiative.

Soft Launching OEI dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Bali, Indonesia yang dihadiri oleh ke-6 negara. Dalam pertemuan dimaksud, ke-6 negara sepakat bahwa kerjasama *OEI* akan digunakan oleh para Menhan



Sumber : Biro Humas Kemhan



Sumber : Biro Humas Kemhan

untuk saling berkonsultasi guna menentukan upaya-upaya kolektif dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Pertemuan juga menghasilkan *Joint Statement Our Eyes Initiative* yang ditandatangani oleh ke-6 Menhan dengan 3 kesepakatan yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama pertukaran informasi strategis terkait dengan terorisme, radikalisme dan *violence extremism*.
2. Menjajaki mekanisme yang ada dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang disebabkan oleh terorisme, radikalisme dan kekerasan ekstrimisme yang dapat mempengaruhi perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di Kawasan.
3. Mendorong kolaborasi yang lebih besar dengan negara yang terlibat dalam mencapai tujuan dari Deklarasi Bersama dengan mengutamakan saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai.

Pada pertemuan *ADSOM WG* di Singapura tahun 2018, *ASEAN* sepakat untuk memperluas pelibatan *Our Eyes* ke-4 negara *ASEAN* lainnya. Pada pertemuan ini Indonesia telah menyusun *concept paper* untuk di sahkan dalam pertemuan *ADMM* ke-12 di Singapura tahun 2018.

ASEAN Our Eyes Working Group. Dalam rangka menindaklanjuti *concept paper OE* yang telah disahkan, Indonesia melaksanakan beberapa *working group* dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Pertemuan Pertama *ASEAN Our Eyes (AOE)* yang telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober 2018 di Jakarta,

dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penggunaan *ASEAN Direct Communication Infrastructure (ADI)* dalam operasionalisasi pertukaran informasi strategis *AOE*
 - 2) Pengenalan *Platform 365* yang berada di bawah *ASEAN Chief of Defence Force Meeting (ACDFM)* untuk mendukung operasionalisasi *AOE*.
 - 3) Indonesia mengusulkan penggunaan 3 sistem jaringan untuk *AOE* yaitu telepon/*fax*, video *teleconference* dan email dengan sistem yang akan disiapkan oleh Indonesia.
 - 4) Penyusunan *Draft Term of Reference (ToR) on Our Eyes* yang semula hanya melibatkan 6 negara *ASEAN*, forum menilai pentingnya untuk melibatkan seluruh negara *ASEAN*.
 - 5) Mengangkat *ToR OE* dalam pertemuan *ADSOM WG* di Thailand 2019
- b. Pertemuan Kedua *ASEAN Our Eyes (AOE)* yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Januari 2019 yang menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Perubahan nama "*Our Eyes*" menjadi "*ASEAN Our Eyes*" (*AOI*)
 - 2) Penambahan satu poin mengenai definisi "*Strategic Information*" sehingga masing-masing *AMS* memiliki pemahaman yang

sama.

- 3) Menghapus penggunaan istilah *ISIS (Islamic States of Iraq Syria)* dan menggantinya dengan istilah *DAESH* karena mereka bukan negara dan tidak mewakili agama di Islam.
- 4) Penandatanganan Deklarasi Bersama/ *Joint Declaration the 13th ADMM on "Sustainable Security"*. Para Menhan menyatakan akan lebih meningkatkan kerjasama keamanan yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas antara negara anggota *ASEAN* maupun dengan negara mitra wicara dalam menghadapi ancaman keamanan tradisional dan non tradisional di kawasan *ASEAN*.

Pencapaian kerjasama dengan negara sahabat untuk Peningkatan Peran TNI dalam *Peace Keeping Operation (PKO)* dan pengembangan kemampuan (*Capability Building*).

Peran dan fungsi TNI pada era reformasi ini telah tercatat melalui berbagai kebijakan di bidang Pertahanan Keamanan yang lebih dititik beratkan kepada penataan dan fungsi TNI. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut diantaranya adalah memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut berpartisipasi dalam upaya memelihara perdamaian dunia.

Indonesia telah banyak mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian dunia sebagai bentuk

upaya mengatasi permasalahan perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan. Kegiatan ini telah mendapat apresiasi positif dari masyarakat internasional. PBB memberi kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pasukan perdamaian dari Indonesia. Kepercayaan ini sebagai bukti bahwa pasukan Garuda Indonesia selalu konsisten memperlihatkan kinerja yang membanggakan. Saat ini pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di seluruh dunia berjumlah 3074 personel yang tersebar di berbagai wilayah konflik yaitu Lebanon, Kongo, Haiti, Liberia, Sudan Selatan dan Darfur serta Suriah.

Berlandaskan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengamanatkan bahwa tugas pokok TNI selain perang adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, maka TNI terus ikut dalam usaha misi perdamaian dunia sebagaimana yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu dua puluh tahun ini.

Disamping tugas dalam misi perdamaian dunia, TNI juga berusaha aktif membantu negara lain jika tertimpa bencana alam. Yang pasti TNI akan selalu siap kapanpun dan dalam kondisi apapun untuk membantu negara-negara lain yang terkena bencana tanpa memandang haluan politik negara yang terkena bencana. Hal tersebut sesuai misi yang dijalankan oleh TNI yaitu misi kemanusiaan.

Para prajurit TNI melaksanakan misi perdamaian dunia dalam wujud nyata perbaikan sarana dan prasarana, mengerjakan konstruksi pembuatan jalan, jembatan dan lapangan landas pesawat terbang selain itu juga melakukan *Engineering Section (SE)* pada daerah setempat.

Peranan TNI yang turut serta dalam kebijakan pemeliharaan perdamaian dunia menunjukkan keterkaitan TNI dalam kanvas lingkungan internasional. Apapun definisinya, yang pasti TNI sebagai bagian dari suatu bangsa turut berinteraksi dengan bangsa lain dalam usaha ketertiban dunia,

sehingga wujud peranan TNI tidak diragukan dalam pergaulan internasional.

TNI memiliki banyak reputasi yang terbilang gemilang baik dalam negeri maupun dalam dunia internasional, mulai dari keterlibatan pasukan TNI dalam berbagai misi perdamaian dunia hingga dominasi TNI pada berbagai perlombaan di bidang militer, antara lain:

A. Peran TNI dalam misi perdamaian dunia.

Dalam penugasan di luar negeri, Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Hal ini tentu saja mengenai penilaian yang baik dan tinggi tentang pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia dikarenakan militer Indonesia sangat disiplin. Keterlibatan satuan TNI dalam penugasan Internasional sebagai penjaga perdamaian PBB, TNI diakui PBB sebagai pasukan perdamaian yang profesional, dapat diterima oleh banyak pihak dan senantiasa dekat di hati penduduk setempat.



Sumber: Biro Humas Kemhan



Sumber: Biro Humas Kemhan

Sejak tahun 1957 TNI bergabung dengan Misi Perdamaian Dunia PBB. Team yang bergabung dengan misi ini namanya Kontingen Garuda atau Konga. Di dunia internasional disebutnya Garuda *Deployment*.

Pasukan Garuda lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas, memperkuat citra TNI di dunia internasional, dengan membangun standar personel dan kelengkapannya sebagai acuan tugas dalam misi perdamaian dunia. Hal ini penting, karena akan menjadi pondasi bagi kontribusi TNI dalam misi perdamaian dunia di masa mendatang.

Kontingen Garuda diterjunkan untuk menjaga perdamaian di berbagai negara sebagai berikut: Mesir, Beirut, Gaza (1957); Kongo (1960 s.d. sekarang); Vietnam (1973); Timur Tengah (1973); Semenanjung Sinai, untuk misi perdamaian perang Israel-Mesir (1973); Timur Tengah (1974-1979); Dari Suez dipindahkan ke Semenanjung Sinai (1977); Iran-Irak (1988, 1989, 1990); Namibia (1989); dan Irak-Kuwait (1992-1995).

Tahun 1992 Kontingen Garuda mengembalikan personel Amerika Serikat yang ditangkap oleh Polisi Irak di wilayah Kuwait. Di samping itu Kontingen Garuda berhasil membujuk suku Bieloven untuk tidak melaksanakan kegiatan pasar gelap; Kamboja (1992-1993); Somalia (1992); Bosnia-Herzegovina (1993-1995); Georgia (1994-2009) untuk mengawasi perjanjian damai antara Rep. of Georgia dan Rep. of Abkhazia (*Self Autonomous*) yang merupakan upaya pemecahan diri dari sebagian wilayah; Mozambik (1994); Filipina (1994) bertugas di Filipina sebagai pengawas gencatan senjata setelah adanya perundingan antara MNLF pimpinan Nur Misuari dengan pemerintah Filipina; Tajikistan (1997); Sierra Leone (1999-2002) bertugas sebagai misi pengamat; Liberia (2003-2008) sebagai pengamat militer (*military observer*); Sudan (2008-2009) Monitor, verifikasi dan implementasi Perjanjian Damai Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement/CPA*) dengan sasaran yaitu Proses Gencatan senjata, Proses DDR, Sensus, Pemilu dan Referendum; Nepal (2007-2011); dan Republik Central Afrika (2014 s.d. sekarang).

B. Prestasi TNI dalam bidang perlombaan menembak internasional.

Keikutsertaan TNI AD dalam perlombaan menembak Australian *Army Skill at Arms Meet (AASAM)*. Sejak keikutsertaan Indonesia dalam event Australian *Army Skill at Arms Meet (AASAM)* sejak 2008, Indonesia kembali mengukuhkan kemenangan untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2008 sampai 2019. Pencapaian menjuarai lomba tembak se-Asia Pasifik ini, membuktikan bahwa kemampuan prajurit TNI AD dan senjata produksi industri pertahanan dalam negeri dapat disejajarkan. Bahkan melebihi kemampuan prajurit negara maju dan produksi alutsista luar negeri.

Berikut catatan lengkap kemenangan dan peraih medali oleh Kontingen Indonesia dalam *Australian Army Skill at Arms Meet (AASAM)* di Australia:

- 1) Tahun 2008, 19 Medali Emas, 23 perak dan 8 perunggu.

A Australian Army Skill at Arms Meet (AASAM) menunjukkan superioritas kemampuan menembak TNI AD. Torehan pada AASAM 2019 di Australia, melanjutkan kedigdayaan TNI AD dalam ajang AASAM.

TNI AD JUARA (LAGI) MENEMBAK DI AUSTRALIA

RAIHAN MEDALI 3 TAHUN TERAKHIR

2017
 🥇 28 🥈 6 🥉 5

2018
 🥇 38 🥈 18 🥉 13

2019
 🥇 21 🥈 14 🥉 10
 Emas Perak Perunggu

🏆 Raihan 12x Juara umum berturut-turut TNI AD
 ⭐ Mengungguli Australia di posisi ke-2 dan Malaysia di posisi ke-3:
 🎯 Sertu Woli Hamsan mendapat gelar *Champion Shot*

NOSTALGIA MEDAN TEMBAK AASAM

- Media Australia pernah menghujat keikutsertaan TNI AD dalam AASAM 2015
 - Hujatan berhubungan dengan isu hukuman mati *Bol Nine*
- Senjata TNI AD sempat diminta untuk diperiksa saat AASAM 2015
 - Permintaan berasal dari kontingen Amerika Serikat dan Australia
 - TNI AD dicurigai memodifikasi senjata
 - Permintaan ditolak kontingen TNI AD
- Pada AASAM 2018, 2 penembak sniper TNI AD menorehkan "One Shoot Two Kills"
 - Mengenal 2 sasaran dengan 1 peluru
- Ditorehkan Serka Yuda Irawan & Serka Novian Budiyanto

SENAPAN SERBU (SS2)

- Pengembangan material, konstruksi, & dimensi senjata
- Senjata jadi lebih ringan, hentakan kecil, tahan panas, dan modern
- Varian terbaru: SS2 Subsonic Kal.5.56 mm

PISTOL G2

- Pengembangan desain dan konstruksi
- Senjata jadi lebih ergonomis, nyaman digenggam, & akurasi lebih baik
- Varian terbaru: G2 Combat, G2 Elite, dan G2 Premium (untuk atlet menembak)

AKURAT.co SUMBER: Dinas Penerangan TNI AD, Pemberitaan Media | NASKAH: Gery Gugustomo
 FOTO: AASAM | ILLUSTRASI & DESAIN: Candra Nawa | APRIL 2019

12) Tahun 2019, 21 Medali Emas, 14 Perak dan 10 Perunggu

Keikutsertaan TNI AD dalam perlombaan menembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM). Dalam keikutsertaannya sejak tahun 1991, Kontingen TNI AD telah berhasil merebut juara umum ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) sebanyak 13 kali yaitu tahun 1992, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 dan 2018. Pencapaian prestasi prajurit TNI AD sebagai juara umum pada lomba tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) sebanyak 13 kali tersebut, merupakan prestasi rakyat dan bangsa Indonesia. Lomba ini diikuti oleh 10 negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei dan Kamboja.

Penutup

Untuk menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya dilakukan TNI melalui penugasan didalam negeri dalam rangka menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, tetapi juga dilakukan di Luar Negeri dengan melakukan banyak kegiatan yang berguna untuk kepentingan Bangsa. Diplomasi dan kerjasama bidang pertahanan dalam mendukung peran TNI di forum regional ataupun internasional dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui kerjasama bilateral, kerangka ASEAN, di forum Internasional dan melalui misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di mata dunia Internasional****

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2) Tahun 2009, 24 Medali Emas, 17 Perak, dan 16 Perunggu</p> <p>3) Tahun 2010, 22 Medali Emas, 13 Perak, dan 14 Perunggu</p> <p>4) Tahun 2011, 7 Medali Emas, 9 Perak, dan 5 Perunggu</p> <p>5) Tahun 2012, 25 Medali Emas, 12 Perak, 14 Perunggu</p> <p>6) Tahun 2013, 17 Medali Emas, 17 Perak dan 15 Perunggu</p> | <p>7) Tahun 2014, 32 Medali Emas, 15 Perak dan 20 Perunggu</p> <p>8) Tahun 2015, 30 Medali Emas, 16 Perak dan 10 Perunggu</p> <p>9) Tahun 2016, 24 Medali Emas, 17 Perak, 16 Perunggu</p> <p>10) Tahun 2017, 28 Medali Emas, 6 Perak dan 5 Perunggu: 5</p> <p>11) Tahun 2018, 36 Medali Emas, 24 Perak, 12 Perunggu</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Sumber: Biro Humas Kemhan



Menteri Pertahanan dan segenap Keluarga Besar
Kementerian Pertahanan
mengucapkan

DIRGAHAYU TNI KE - 74

5 OKTOBER 2019

Semoga semakin
tangguh dan kokoh
sebagai Garda
Terdepan dalam
menjaga wilayah NKRI



Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan RI